

---

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PER 31 DESEMBER 2016**

---

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 33 Tahun 2004, dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bupati selaku kepala daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran (TA) 2016 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 yang dirubah dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/316/BAKD, tanggal 5 April 2007. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem yaitu untuk:

1. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem;
2. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana; dan
3. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan laporan keuangan TA 2016 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578);
7. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4).

## **1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

**Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan

**Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

**Bab IV Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Asumsi Dasar dan Basis Pengukuran
- 4.3 Kebijakan Akuntansi Pokok

**Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

- 5.1 Penjelasan Pos Neraca
- 5.2 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.3 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.4 Penjelasan Pos Laporan Operasional
- 5.5 Penjelasan Pos Laporan Arus Kas
- 5.6 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.7 Informasi Lain
- 5.8 Pengungkapan Informasi untuk Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja

**Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

- 6.1 Letak Geografis
- 6.2 Dasar Hukum Pembentukan
- 6.3 Pemerintahan
- 6.4 Lainnya

## **BAB II**

### **Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 903/1456/Bappeda/Nomor: 903/170/DPRD tanggal 14 Agustus 2015 tentang Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Karangasem TA 2016 dan Nomor 903/1457/Bappeda/Nomor 903/171/DPRD tanggal 14 Agustus 2015 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Karangasem TA 2016, prioritas pembangunan daerah pada tahun 2016 difokuskan pada :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran.
3. Kesehatan.
4. Pendidikan.
5. Infrastruktur.
6. Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana.
7. Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
8. Pertanian dan Ketahanan Pangan.
9. Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UKM.
10. Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan.

Beberapa indikator kondisi ekonomi makro yang dijadikan pertimbangan dalam penyusunan APBD tahun 2016 adalah sebagai berikut:

##### **2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi, merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan suatu daerah. Dengan berubahnya tahun dasar dalam perhitungan PDRB yang awalnya menggunakan tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010, juga terjadi perubahan yang dulunya menggunakan 9 sektor menjadi 17 kategori menyebabkan adanya penyesuaian angka dalam perhitungan PDRB. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem Tahun 2015 mengalami perlambatan dimana laju pertumbuhan PDRB Tahun 2014 berdasarkan harga konstan sebesar 6,01 persen melambat menjadi 6,00 persen di Tahun 2015, Dengan terbentuknya Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) disetiap Kabupaten/Kota yang diprakarasi oleh Bank Indonesia berdampak terhadap stabilitas laju inflasi di Bali, Perhitungan inflasi di Bali didasarkan pada hasil survei yang dilakukan di Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng yang mewakili seluruh Kabupaten/Kota di Bali, Laju Inflasi di Bali pada tahun 2015 tergolong terkendali yaitu sebesar 1,68 persen sedangkan laju inflasi pada tahun 2014 sebesar 8,43 persen.

Pertumbuhan ekonomi Karangasem pada tahun 2015 tidak terlepas dari pertumbuhan sektor-sektor yang menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Karangasem. Dari tujuh belas sektor ekonomi, dilihat dari Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2000, hampir semua sektor mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2015. Hanya sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan negatif

sebesar-2,6%. hal ini merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan perlambatan ekonomi Kabupaten Karangasem pada Tahun 2015.

### 2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem Tahun 2015 sebesar 6,00% atas dasar harga konstan. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan Tahun 2014 yang mencapai 6,01% maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem mengalami perlambatan sebesar 0,01%.

Perkembangan PDRB Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2015 sebagaimana tabel berikut:

**PDRB Kabupaten Karangasem Menurut Lapangan Usaha  
Tahun 2014-2015**

No	Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)		PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Juta Rupiah)	
		2014	2015	2014	2015
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2.880.760,60	3.242.067,95	2.284.089,99	2.392.039,83
B	Pertambangan dan Penggalian	439.498,77	473.552,59	347.808,67	338.773,92
C	Industri Pengolahan	432.722,06	506.182,28	354.622,31	381.588,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.098,74	9.353,72	7.956,20	8.010,80
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.311,53	15.480,34	12.862,41	13.682,10
F	Konstruksi	624.930,42	703.134,84	501.779,15	535.832,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	566.297,73	653.913,43	464.565,57	493.943,24
H	Transportasi dan Pergudangan	1.820.720,74	2.181.918,59	1.284.074,22	1.394.895,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.150.656,21	1.321.462,65	739.746,69	777.586,07
J	Informasi dan Komunikasi	336.555,25	367.160,14	325.528,53	345.083,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	488.809,13	555.990,51	379.532,95	408.656,07
L	Real Estate	462.128,69	516.748,78	396.925,64	418.679,65
M,N	Jasa Perusahaan	74.851,14	85.622,71	63.562,83	67.983,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	843.929,30	922.161,99	785.980,03	827.920,84
P	Jasa Pendidikan	241.331,40	278.629,26	201.759,23	221.128,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	186.030,68	222.786,09	159.613,10	180.362,80
R,S,T,U	Jasa Lainnya	215.498,18	247.662,39	172.545,64	186.112,27
	<b>PDRB</b>	<b>10.785.130,59</b>	<b>12.303.828,25</b>	<b>8.482.953,16</b>	<b>8.992.278,88</b>

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

Berdasarkan atas harga berlaku, nilai absolute PDRB Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 mencapai 12.303.828,25 juta rupiah meningkat 1.518.697,66 juta rupiah (14,08 %) dibandingkan dengan Tahun 2014 yang besarnya 10.785.130,59 juta rupiah.

**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem Tahun 2015  
Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010**

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB	
		Harga Berlaku (%)	Harga Konstan 2010 (%)
1	2	3	4
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	12,54	4,73
B	Pertambangan dan Penggalian	7,75	-2,6
C	Industri Pengolahan	16,98	7,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	31,77	0,69
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,29	6,37
F	Konstruksi	12,51	6,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,47	6,32
H	Transportasi dan Pergudangan	19,84	8,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,84	5,12
J	Informasi dan Komunikasi	9,09	6,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,74	7,67
L	Real Estate	11,82	5,48
M,N	Jasa Perusahaan	14,39	6,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,27	5,34
P	Jasa Pendidikan	15,46	9,6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,76	13
R,S,T,U	Jasa Lainnya	14,93	7,86
<b>Laju Pertumbuhan PDRB</b>		<b>14,08</b>	<b>6,01</b>

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu Sektor Jasa Pendidikan (9,6%); Sektor Transportasi dan Pergudangan (8,63%); Sektor Jasa Lainnya (7,86%); Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (7,67%) disusul oleh sektor-sektor lain.

### 2.1.3 Struktur Perekonomian

Pada Tahun 2015, struktur perekonomian daerah Kabupaten Karangasem masih didominasi oleh sektor tersier dengan kontribusi sebesar 59,77%, meningkat sebesar 0,55% dibandingkan Tahun 2014 yang besarnya 59,22%.

Sektor sekunder sebesar 10,03%, mengalami peningkatan sebesar 0,03% dibandingkan Tahun 2014 yang besarnya 10,00%. Sedangkan sektor primer kontribusinya sebesar 30,20%, turun sebesar 0,59% dibandingkan Tahun 2014 yang besarnya 30,79%. Hal ini sedikit sesuai dengan harapan pembangunan di bidang ekonomi yaitu meningkatnya sektor sekunder dan tersier serta menurunnya peranan sektor primer namun nilai absolute tetap tinggi.

**Nilai PDRB Kabupaten Karangasem dan Kontribusi Sektor  
Atas Dasar Harga Belaku Tahun 2014-2015**

Sektor	2014		2015	
	Nilai (Milyar Rp)	Kontribusi (%)	Nilai (Milyar Rp)	Kontribusi (%)
1	2	3	4	5
Primer	3.320,26	30,79	3.715,62	30,20
Sekunder	1.078,00	10,00	1.234,15	10,03
Tersier	6.386,81	59,22	7.354,06	59,77
<b>PDRB</b>	<b>10.785,07</b>	<b>100,00</b>	<b>12.303,83</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

Atas dasar kondisi ekonomi makro tersebut, penyusunan APBD 2016 dan perubahannya dilakukan dan diupayakan realistis sesuai kebutuhan dan kemampuan nyata daerah dengan memperhatikan skala prioritas dalam penyusunan program dan kegiatan.

## 2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan, serta dengan mempertimbangkan kondisi, potensi daerah, maka arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang ditempuh adalah pemulihan perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemulihan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diupayakan melalui peningkatan investasi, konsumsi masyarakat, peningkatan ekspor termasuk peningkatan sektor pariwisata, peningkatan peran UMKM, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan.

Pembangunan ekonomi bertumpu pada tiga sektor andalan yaitu sektor pertanian dalam arti luas, industri kecil, menengah dan koperasi serta sektor pariwisata. Ketiga sektor ini disamping mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi



perekonomian daerah, juga mampu membuka peluang berusaha, peluang kerja serta peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **2.2.1 Pendapatan Daerah**

Sumber pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Karangasem adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan atau Transfer dari Pemerintah Atas (Pusat, Provinsi) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Dalam penetapan PAD agar ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun lalu, peningkatan dari potensi pendapatan obyek yang ada, kebijakan pemerintah, dan faktor keamanan. Dalam kaitan rencana pencapaian target pendapatan daerah dalam menunjang kemandirian daerah ditempuh melalui kebijakan:

1. Mengintensifkan penerimaan dari pajak maupun retribusi melalui peningkatan manajemen pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak;
2. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah;
3. Memperjuangkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya; dan
4. Menjaga dan mengembangkan stabilisasi ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

### **2.2.2 Belanja Daerah**

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan arah kebijakan ditekankan pada upaya antara lain: (1) peningkatan penanggulangan kemiskinan, (2) peningkatan akses dan pemerataan pendidikan, (3) peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, (4) peningkatan kualitas pertumbuhan pertanian, perikanan dan kehutanan, (5) peningkatan ekonomi lokal dengan mengembangkan usaha skala mikro, (6) peningkatan produktifitas dan akses UKM kepada sumberdaya produktif, (7) serta meningkatkan pelayanan infrastruktur.

Dengan berbagai kemajuan yang dicapai tahun sebelumnya, permasalahan dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Permasalahan sosial yang dihadapi masih diwarnai dengan permasalahan kemiskinan, pengangguran, kekeringan dan kesempatan kerja, yang lebih lanjut mengakibatkan keterbatasan kemampuan dalam mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Sedangkan dari aspek sosial lainnya seperti pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

Pembangunan pendidikan sampai saat ini masih menghadapi masalah dan tantangan yang terkait dengan pemerataan pendidikan, baik pendidikan dasar dan menengah, yang ditandai dengan tingkat kesenjangan partisipasi pendidikan yang lebih lebar antarkelompok. Sedangkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan adalah ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan,

rendahnya tingkat keberlanjutan pelayanan kesehatan dan rendahnya jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.

Disisi lain kualitas pelayanan sosial dasar kepada masyarakat belum sesuai harapan, keterbatasan jangkauan dan kemampuan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat, sebagai sumber dan potensi kesejahteraan sosial merupakan tantangan lain yang harus dihadapi. Adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial telah mendorong bergesernya paradigma pembangunan kesejahteraan sosial kearah yang lebih mengedepankan peran aktif masyarakat, baik secara perorangan maupun berkelompok.

- 2) Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi daerah sudah menunjukkan perkembangan kearah yang lebih baik, namun masih perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan keberhasilan agar dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu karakteristik perekonomian daerah dominan dipengaruhi oleh sektor pariwisata, sehingga bila terjadi gangguan terhadap sektor ini maka otomatis mempengaruhi tingkat kemajuan ekonomi daerah. Hal ini memperhatikan investasi sektor pariwisata sangat dipengaruhi oleh sektor penataan ruang khususnya di 3 kawasan pariwisata.

Permasalahan lainnya adalah pengembangan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang diharapkan dapat menyangga perekonomian daerah, belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini diakibatkan berbagai permasalahan seperti masih banyaknya lahan-lahan yang belum produktif akibat ketersediaan air, masih rendahnya produktivitas pertanian dan mutu produk pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan, belum bagusnya pemasaran komoditas spesifik daerah dan masih rendahnya minat investasi untuk pengembangan di bidang pertanian.

- 3) Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, secara umum masih ada beberapa wilayah terpencil, sedangkan kondisi jalan kabupaten cukup memadai. Dengan panjang jalan lebih dari 600 km, tantangan kedepan adalah memelihara kondisi jalan tersebut agar tetap berfungsi optimal. Namun demikian untuk pengembangan wilayah secara keseluruhan, maka kedepan diperlukan peningkatan infrastuktur transportasi yang dapat menstimulir terciptanya keseimbangan antar wilayah.

Air baku, baik untuk air minum maupun pertanian dan peternakan, masih menjadi permasalahan, terutama untuk wilayah-wilayah kering. Pembangunan sistem penyediaan air baku dihadapkan pada masalah sumber mata air. Sumber mata air berada disebagian wilayah saja dan berada umumnya lebih rendah dari wilayah pelayanan.

Penataan ruang merupakan salah satu alat untuk mengendalikan perkembangan pembangunan. Pengendalian pemanfaatan ruang masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi berbagai peraturan yang berlaku dan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mematuhi peraturan terkait penataan ruang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka strategi pembangunan daerah antara lain adalah:

- 1) Memantapkan pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui pencapaian makro ekonomi yang lebih baik dan berkualitas.

- 2) Menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi pembangunan ekonomi terutama sektor unggulan daerah.
- 3) Memberikan peluang yang lebih besar bagi penduduk miskin untuk berprestasi dalam pelaksanaan pembangunan.
- 4) Meningkatkan akses dan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- 5) Meningkatkan pemanfaatan potensi paraiwisata di kawasan strategis kabupaten.

Berdasarkan pada kondisi dan permasalahan maka prioritas pembangunan daerah pada Tahun 2016 adalah :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran.
3. Kesehatan.
4. Pendidikan.
5. Infrastruktur.
6. Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana.
7. Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
8. Pertanian dan Ketahanan Pangan.
9. Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM.
10. Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan.

### 2.2.3 APBD dan Perubahannya

Target kinerja APBD Tahun 2016 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

No	Uraian	APBD	Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan	1.766.956.767.789,37	1.455.013.902.263,25	(311.942.865.526,12)	(17,65)
2	Belanja	1.811.460.387.934,37	1.569.374.885.875,06	(242.085.502.059,31)	(13,36)
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(44.503.620.145,00)</b>	<b>(114.360.983.611,81)</b>	<b>(69.857.363.466,81)</b>	<b>156,97</b>
<b>3</b>	<b>Pembiayaan</b>				
A	Penerimaan Pembiayaan	73.003.620.145,00	142.860.983.611,81	69.857.363.466,81	95,69
B	Pengeluaran Pembiayaan	28.500.000.000,00	28.500.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>44.503.620.145,00</b>	<b>114.360.983.611,81</b>	<b>69.857.363.466,81</b>	<b>156,97</b>
	<b>SILPA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dari data tersebut di atas diketahui terdapat penurunan anggaran pendapatan pada perubahan APBD sebesar Rp311.942.865.526,12 atau 17,65%. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan realisasi sumber-sumber pendapatan yang terjadi karena perubahan peraturan yang diterapkan. Berdasarkan realisasi ini perlu dilakukan penyesuaian proyeksi APBD.

Sedangkan Belanja mengalami penurunan sebesar Rp242.085.502.059,31 atau 13,36% yang disebabkan oleh adanya penurunan target pendapatan Pemerintah Daerah.

Perubahan APBD yang dilakukan menyebabkan nilai defisit menjadi lebih tinggi dari anggaran induk. Defisit ini akan ditutup dengan pemanfaatan SiLPA.

## BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan adalah bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem hendak meningkatkan kemandirian daerah dalam membelanjai seluruh kebutuhan belanjanya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan tingkat kemandirian yang tinggi pada akhirnya dapat menekan/mengurangi ketergantungan pada pemerintah vertikal, baik Provinsi maupun Pusat. Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan strategi pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Berdasarkan langkah tersebut dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

#### 3.1.1 Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan

Ringkasan perbandingan antara realisasi dengan anggaran Tahun 2016 sebagaimana disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	APBD	Realisasi	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan	1.455.013.902.263,25	1.462.024.348.855,80	7.010.446.592,55	100,48
2	Belanja	1.569.374.885.875,06	1.450.826.439.726,43	(118.548.446.148,63)	92,45
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(114.360.983.611,81)</b>	<b>11.197.909.129,37</b>	<b>125.558.892.741,18</b>	<b>(9,79)</b>
<b>3</b>	<b>Pembiayaan</b>				
A	Penerimaan Pembiayaan	142.860.983.611,81	142.694.804.190,82	(166.179.420,99)	99,88
B	Pengeluaran Pembiayaan	28.500.000.000,00	28.248.372.917,64	(251.627.082,36)	99,12
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>114.360.983.611,81</b>	<b>114.446.431.273,18</b>	<b>85.447.661,37</b>	<b>100,07</b>
	<b>SILPA</b>	<b>0,00</b>	<b>125.644.340.402,55</b>	<b>125.644.340.402,55</b>	<b>0,00</b>

Uraian tentang penyebab terjadinya kekurangan dan kelebihan pos-pos pendapatan diuraikan pada Bab V catatan ini, sedangkan penyebab rendahnya realisasi belanja dibandingkan dengan anggarannya disebabkan oleh karena adanya efisiensi dalam pengeluaran belanja operasi dan belanja modal.

#### 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Keuangan

Realisasi pendapatan dan belanja selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2016	2015	2014	2013	2012
I	Pendapatan	1.462.024.348.855,80	1.367.577.569.045,00	1.248.392.022.005,10	1.041.577.611.027,12	907.014.577.615,20
II	Belanja	1.450.826.439.726,43	1.351.846.276.475,30	1.164.216.358.253,38	1.078.485.760.842,26	942.886.355.480,98
	Surplus/Defisit	11.197.909.129,37	15.731.292.569,70	<b>84.175.663.751,72</b>	<b>(36.908.149.815,14)</b>	<b>19.199.375.892,62</b>
III	Pembiayaan					
1	Penerimaan	142.694.804.190,82	155.856.073.975,44	101.416.983.140,31	147.340.373.328,75	120.763.209.594,24
2	Pengeluaran	28.248.372.917,64	28.726.382.933,33	29.748.372.916,59	9.035.247.917,30	4.303.676.412,71
	Pembiayaan Netto	114.446.431.273,18	127.129.691.042,11	127.129.691.042,11	138.305.125.411,45	65.809.178.284,62
	<b>SILPA</b>	<b>125.644.340.402,55</b>	<b>142.860.983.611,81</b>	<b>142.850.281.525,75</b>	<b>101.396.975.596,31</b>	<b>85.008.554.177,24</b>

### 3.1.2.1 Pendapatan

Berdasarkan data di atas, realisasi pendapatan menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Peningkatan pendapatan tersebut ditopang dengan peningkatan PAD dari Tahun 2012 sampai 2016 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2016	2015	2014	2013	2012
1	Pajak Daerah	117.782.188.084,34	139.626.191.925,60	138.541.746.609,27	103.841.035.929,04	92.777.477.829,83
2	Retribusi Daerah	15.984.975.219,86	14.255.155.130,03	13.022.202.125,88	11.991.691.406,92	10.977.702.203,97
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.592.314.005,36	13.535.055.710,61	13.535.055.710,61	17.064.083.381,58	15.235.409.461,67
4	Lain-lain PAD yang sah	85.284.535.920,02	75.709.514.667,36	70.796.972.353,16	37.584.653.077,08	28.793.626.051,68
<b>Jumlah</b>		<b>232.644.013.229,58</b>	<b>243.125.917.433,60</b>	<b>239.425.004.469,89</b>	<b>168.652.789.874,71</b>	<b>144.019.629.474,70</b>

Kenaikan Pajak Daerah dari tahun anggaran 2012 hingga 2016 terutama didorong oleh diterapkannya regulasi perpajakan daerah dan membaiknya kondisi pariwisata. Sedangkan realisasi untuk retribusi daerah terjadi fluktuasi setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh subyek dan obyek retribusi.

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan cenderung meningkat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini disebabkan penambahan penyertaan modal pada Bank BPD Bali setiap tahunnya.

Lain-Lain PAD yang Sah, berasal dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro dan bunga deposito, komisi atas aset Pemerintah Provinsi Bali, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, pendapatan dari pengembalian atas pelaksanaan kegiatan, pendapatan denda, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD, dana kapitasi JKN dan hasil pengelolaan investasi non permanen.

Sedangkan dana perimbangan, baik dari pusat dan provinsi, tingkat pencapaiannya sangat tergantung pada instansi vertikal tersebut. Hal ini pun tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang sangat mempengaruhi pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

### 3.1.2.2 Belanja

Gambaran realisasi belanja secara total dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran belanja selalu dikaitkan dengan prioritas kebutuhan dan ketersediaan dana. Secara ringkas uraian belanja selama Tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2016	2015	2014	2013	2012
1	Belanja Operasi	1.246.494.468.642,27	1.156.551.120.791,77	941.130.369.565,51	853.476.454.219,53	755.351.463.458,65
2	Belanja Modal	190.437.979.386,10	178.424.638.836,46	177.557.758.591,00	180.737.648.153,00	171.630.950.269,00
3	Belanja Tak Terduga	163.681.200,00	584.263.646,00	-	3.100.598.816,29	2.158.123.350,00
4	Bagi Hasil ke Desa	13.730.310.498,06	16.286.253.201,07	45.528.230.096,87	41.171.059.653,44	13.745.818.403,33
<b>Jumlah</b>		<b>1.437.096.129.228,37</b>	<b>1.351.846.276.475,30</b>	<b>1.357.175.846.548,30</b>	<b>1.164.216.358.253,38</b>	<b>1.078.485.760.842,26</b>

Berdasarkan jumlah realisasi belanja di atas dapat diungkapkan bahwa belanja operasi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan belanja pegawai setiap tahunnya sesuai dengan keputusan/kebijakan pemerintah pusat, belanja barang yang didalamnya terdapat barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, hibah kepada masyarakat, dan bantuan sosial kepada masyarakat, belanja modal mengalami fluktuasi sesuai dengan pemenuhan kebutuhan akan sarana prasarana demi kenyamanan masyarakat demikian pula belanja tak terduga berfluktuasi setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan dan tersedianya dana untuk membelanjainya.

Sedangkan bagi hasil ke desa berfluktuasi setiap tahunnya, kondisi ini terjadiseiring dengan peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun-tahun tersebut sebagai dasar perhitungan bagi hasil ke desa/kelurahan. Sedangkan dalam Tahun 2016 transfer bagi hasil ke desa yang bersumber dari dana perimbangan pusat dan provinsi sebesar Rp13.730.310.498,06.

### 3.1.2.3 Pembiayaan

Ringkasan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2016	2015	2014	2013	2012
1	Penerimaan	142.694.804.190,82	155.856.073.975,44	101.416.983.140,31	147.340.373.328,75	120.763.209.594,24
2	Pengeluaran	28.248.372.917,64	28.726.382.933,33	29.748.372.916,59	9.035.247.917,30	4.303.676.412,71

Berdasarkan data tersebut dapat diungkapkan bahwa telah terjadi fluktuasi penerimaan pembiayaan secara terus menerus. Unsur utama dari penerimaan pembiayaan adalah penggunaan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi batas minimal pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan setiap tahun relatif fluktuatif, secara rutin pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-pemerintah pusat, pokok pinjaman dalam negeri-lainnya selebihnya adalah penanaman modal pemerintah. Penanaman modal dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan sumber-sumber PAD dan sangat tergantung dengan kemampuan kas daerah.

### 3.1.3 Derajat Kemandirian

Berdasarkan realisasi APBD dapat diukur tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan menggunakan ukuran beberapa rasio atau perbandingan sebagai berikut:

#### 3.1.3.1 PAD terhadap Belanja

Perbandingan PAD terhadap jumlah belanja adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja}} = \frac{232.644.013.229,58}{1.450.826.439.726,43} \times 100\% = 16,04\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem hanya mampu mendanai belanja sebesar 16,04% sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi.

### 3.1.3.2 PAD terhadap Belanja Operasi

Perbandingan PAD terhadap jumlah belanja operasi adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja Operasi}} = \frac{232.644.013.229,58}{1.246.494.468.642,27} \times 100\% = 18,66\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem hanya mampu mendanai belanja operasi sebesar 18,66%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa untuk menjaga kelangsungan operasi pelaksanaan pemerintahan pun belum dapat didanai dengan PAD.

### 3.1.3.3 PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Belanja

Perbandingan PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap jumlah belanja adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{PAD + Bagi Hasil Pajak+Bukan Pajak}}{\text{Belanja}} = \frac{255.091.419.321,58}{1.450.826.439.726,43} \times 100\% = 17,58\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem ditambah dengan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak hanya mampu menutupi belanja sebesar 17,58%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Karangasem baik yang dipungut sendiri maupun melalui pemerintah pusat belum dapat menutupi kebutuhan belanja pemerintah.

### 3.1.3.4 PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Belanja Operasi

Perbandingan PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap jumlah belanja operasi adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{PAD + Bagi Hasil Pajak+Bukan Pajak}}{\text{Belanja Operasi}} = \frac{255.091.419.321,58}{1.246.494.468.642,27} \times 100\% = 20,46\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem ditambah dengan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak hanya mampu menutupi belanja operasi sebesar 20,46%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Karangasem baik yang dipungut sendiri maupun melalui pemerintah pusat belum dapat menutupi kebutuhan operasional pemerintahan.

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah masih cukup rendah, sehingga ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi masih cukup besar.

Perkembangan ukuran kemandirian terutama berdasarkan realisasi PAD yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	
						Realisasi	Target
1	PAD	15,27	15,64	15,64	17,98	16,03	14,61
	Belanja						
2	PAD	19,07	19,76	19,76	21,02	18,66	17,69
	Belanja Operasi						

Dari data tersebut bahwa pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki tingkat kemandirian yang lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2015. Hal ini disebabkan karena adanya jumlah Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan menurun dibandingkan dengan belanja yang dikeluarkan. Namun lebih tinggi dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014.

Khusus Tahun 2016, rasio kemandirian yang ditargetkan sebesar 14,61% untuk menopang belanja dan 17,69% untuk menopang belanja operasi berhasil direalisasi dengan tingkat capaian masing-masing sebesar 16,03% dan 18,66%. Capaian ini didukung oleh adanya upaya efisiensi dan penghematan dalam pengeluaran belanja.

### 3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Masih terdapat hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja keuangan, khususnya bidang pendapatan. Tahun 2016 masih banyak wajib pajak yang belum menyelesaikan tunggakan pajak baik pajak hotel, restoran dan pajak hiburan, pajak reklame dan PBB P2 yang baru pada Tahun 2014 diserahkan ke daerah. Hal tersebut mengakibatkan masih tingginya saldo piutang pajak.

Kinerja keuangan, bidang belanja Tahun 2016 tidak mengalami kendala yang berarti. Secara umum belanja dilakukan dalam batas pagu anggaran yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip penghematan dan efisiensi dalam pengeluaran belanja.

Kinerja Penerimaan Pembiayaan sesuai dengan target yang dianggarkan dalam Tahun 2016. Sedangkan kinerja pengeluaran pembiayaan dilakukan dalam batas pagu yang dianggarkan.

Penjelasan capaian kinerja setiap jenis pendapatan dan belanja dapat dilihat pada Bab V.

Sehubungan dengan beberapa kendala tersebut, beberapa langkah yang akan dilakukan dalam Tahun 2016 adalah:

1. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi atas potensi pajak dan retribusi yang ada di Kabupaten Karangasem;
2. Memberikan stimulan/rangsangan kepada wajib pajak yang membayar pajak secara tepat waktu dengan pemberian hadiah;
3. Menata dan mengkaji produk hukum pendapatan daerah;
4. Mengembangkan sarana dan prasarana pendapatan;
5. Meningkatkan SDM dalam bidang pendapatan;
6. Mengadakan penjajagan dan pendataan obyek pendapatan baru; dan
7. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam peningkatan pendapatan daerah.



## **BAB IV**

### **Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan akuntansi ditetapkan untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2016 juga telah mengalami perubahan.

#### **4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan data keuangan yang disiapkan oleh entitas akuntansi, yakni para pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Pengguna anggaran dan pengguna barang tersebut terdiri dari: 2 Sekretariat (Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah dengan 10 Unit Bagian), 16 Dinas, 7 Badan, 4 Kantor, 1 unit RSUD, 1 Inspektorat, 8 Kecamatan dan 3 Kelurahan.

#### **4.2 Asumsi Dasar dan Basis Pengukuran**

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Karangasem Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian Entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai entitas pelaporan;
2. Kesenambungan Entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem berlanjut keberadaannya/berkesinambungan;
3. Pengukuran dalam Rupiah, Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang Rupiah;
4. Dasar kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah;
5. Dasar akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Eksistensi Aset, Pendapatan dan Beban dipengaruhi oleh transaksi penerimaan dan pengeluaran dari Kas Daerah (transaksi kas), juga dipengaruhi oleh transaksi non kas;

Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak melakukan penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis akrual sesuai dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan;

6. Asas Bruto, Prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan

pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;

7. Harga Perolehan (*historical cost*), Nilai aset diakui sebesar harga perolehan yaitu seluruh pembayaran yang dilakukan pada waktu memperoleh barang tersebut, mulai harga pembelian/pengadaan barang tersebut ditambah biaya-biaya lainnya (jika ada) yang dikeluarkan sampai barang tersebut siap di tempat dan siap digunakan;
8. Periode Akuntansi, Informasi disajikan berdasarkan periode akuntansi dengan memakai tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016; dan
9. Dana Umum (kecuali aset), Pertanggungjawaban keseluruhan penerimaan dan pengeluaran termasuk aset, utang dan ekuitas dana, pada prinsipnya adalah melalui dana umum berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun khusus untuk aset, apabila terdapat perolehan aset berupa hibah dan *dropping* dari pemerintah pusat/instansi lebih tinggi atau pihak lain yang tidak melalui mekanisme APBD, sepanjang terdapat perpindahan hak kepemilikan, tetap diakui sebagai aset daerah.

### **4.3 Kebijakan Akuntansi Pokok**

#### **4.3.1 Pendapatan**

1. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;
2. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumbernya dan dirinci berdasarkan kelompok dan jenis pendapatan;
3. Pendapatan diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang diterima di kas daerah;
4. Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas brutto, yaitu mencatat penerimaan brutto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
5. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai ekuitas dana umum;
6. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima; dan
7. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

#### **4.3.2 Belanja**

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
2. Belanja diklasifikasikan menurut penggunaan dan pusat pertanggungjawaban dan dirinci berdasarkan kelompok dan jenis belanja;

3. Pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah;
4. Belanja diakui dalam periode berjalan berdasarkan kas yang dikeluarkan dari kas daerah;
5. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
6. Pengukuran belanja menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan; dan
7. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

#### **4.3.3 Pembiayaan**

1. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;
2. Pembiayaan diklasifikasi menurut sumber pembiayaan, sumber-sumber pembiayaan terdiri dari sumber yang berupa penerimaan dan sumber yang berupa pengeluaran daerah;
3. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman/obligasi, penerimaan kembali pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah antara lain pembayaran utang pokok dan penyertaan modal pemerintah (investasi);
5. Pusat pertanggungjawaban adalah bagian atau fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah;
6. Pembiayaan diakui selama periode berjalan, saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah atau pada saat kas dikeluarkan untuk sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah;
7. Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan;
8. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan dikeluarkan; dan
9. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan pembiayaan.

#### **4.3.4 Aset/Aktiva**

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat,

serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya; dan

2. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

#### 4.3.4.1 Aset Lancar

1. Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi;
2. Aset lancar terdiri atas: kas, piutang, persediaan, dan lain-lain;
3. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan;
4. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang;
5. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;
6. Piutang terdiri atas: piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain, dan sebagainya;
7. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan, sejumlah nilai yang dapat ditagihkan;
8. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk dapat menyajikan piutang sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan harus dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih yang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang;
9. Penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan kualitas piutang dilakukan dengan menggunakan taksiran persentase atas besaran piutang yang kemungkinan tidak tertagih, dengan besaran sebagai berikut :

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	1%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

10. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi;
11. Persediaan terdiri atas: bahan habis pakai kantor, obat-obatan, dan lain-lain; dan
12. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, berdasarkan harga pembelian terakhir untuk persediaan selain obat dan harga real untuk persediaan obat-obatan.

#### 4.3.4.2 Investasi Jangka Panjang

1. Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
2. Investasi jangka panjang antara lain terdiri dari:
  - a. Penyertaan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah; dan
  - b. Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam bentuk Dana Bergulir.
3. Investasi jangka panjang, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah diakui dengan metode harga perolehan atau metode ekuitas sesuai dengan prosentase kepemilikan dan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
4. Investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir dan investasi jangka panjang yang sifatnya nonpermanen diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*);
5. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterimakan kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*)

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 tahun	10%
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 tahun	50%
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 tahun	75%
4	Jatuh tempo pada periode diatas 4 tahun	100%

6. Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat kepemilikan.

#### 4.3.4.3 Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik;
2. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya;
3. Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Konstruksi dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya;
4. Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya;
5. Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, Bangunan air, meliputi bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengaman sungai dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan

- sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya;
6. Gedung dan bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya;
  7. Peralatan dan mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, mesin dan peralatan kantor, rumah tangga, bengkel, studio, pertanian, kedokteran, laboratorium, kesehatan, persenjataan, kendaraan darat bermotor, kendaraan darat tak bermotor, kendaraan apung bermotor, kendaraan apung tak bermotor, pesawat udara dan lain-lain sejenisnya;
  8. Aset tetap lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan kayu dan lain-lain sejenis;
  9. Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan;
  10. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan;
  11. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya;
  12. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah;
  13. Bangunan dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi;
  14. Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan;
  15. Jalan, Irigasi dan Jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun sampai dengan siap untuk digunakan;
  16. Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk digunakan;
  17. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada;
  18. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan;
  19. Aset Tetap lainnya diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan;
  20. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi; dan
  21. Aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus, mulai Tahun 2015, seiring dengan pemberlakuan PP Nomor 71 Tahun 2010, tanpa memperhitungkan sisa umur ekonomis.

#### **4.3.4.4 Dana Cadangan**

1. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran; dan
2. Dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembentukan dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pencairandana cadangan.

#### **4.3.4.5 Aset Lainnya**

1. Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan;
2. Aset lain-lain meliputi piutang angsuran, Kemitraan dengan pihak III, dan lain-lain;
3. Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah;
4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. Ataupun kemitraan dengan pihak lain (Bank) sehubungan kerjasama dalam bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak yang dituangkan juga dalam bentuk penjanjian;
5. Piutang angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aset;
6. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui berdasarkan harga perolehan pada saat dibangun (aset lainnya tersebut selesai dibangun) atau aset tersebut disetujui penempatannya sesuai dengan perjanjiannya; dan
7. Aset Lain-lain adalah aset tetap yang tidak digunakan karena kondisi/digolongkan sebagai rusak berat/tidak dapat digunakan maka aset tersebut dipisahkan dan disajikan ke aset lain-lain sebesar nilai buku (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) dalam neraca.

#### **4.3.5 Kewajiban**

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
3. Kewajiban jangka pendek (lancar) merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan;
4. Utang jangka pendek antara lain terdiri dari Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Lain yang Ditangguhkan dan Biaya yang Masih Harus Dibayar;
5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
6. Utang PFK adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;

7. Utang jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi;
8. Utang jangka panjang merupakan pinjaman dalam negeri kepada pemerintah pusat;
9. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan;
10. Utang PFK, Pendapatan Lain yang Ditangguhkan, Biaya yang Masih Harus Dibayar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan;
11. Utang Dalam Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupapenerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan atau nilai sisa hutang yang belum jatuh tempo dalam waktu 12 bulan mendatang; dan
12. Utang jangka pendek dan utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang Rupiah yang harus dibayar kembali, dalam mata uang Rupiah.

#### 4.3.6 Ekuitas

1. Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban; dan
2. Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan pos – pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir;

#### 4.3.7 Kebijakan Khusus untuk Aset Tetap

1. Nilai perolehan Aset Tetap yang masih 0 atau Rp1,00 dikoreksi dengan nilai wajar pada tanggal perolehan;
2. Kebijakan penyusutan diberlakukan dalam Tahun 2016, seiring dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang didalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Untuk memudahkan perhitungan tarif penyusutan dan konsistensi penerapannya di masa mendatang, masa manfaat aset tetap diestimasi dalam koridor sebagai berikut:

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat(Tahun)
1	Peralatan dan Mesin	5 – 10
2	Gedung dan Bangunan	25
3	Jalan, irigasi, dan jaringan	12
4	Aset tetap lainnya	0

3. Dalam penghitungan penyusutan 2014, langkah awal yang dilakukan adalah menetapkan sisa umur ekonomis aset tetap per 31 Desember 2014 sebagai dasar pembagi perhitungan penyusutan 2014. Sisa umur aset tetap dihitung dengan cara mengurangi umur manfaat dengan tahun perolehan. Namun untuk Tahun 2016 penyusutan aset tetap tanpa memperhitungkan umur ekonomis, disusutkan dengan membagi nilai aset tetap dengan umur ekonomis sesuai masa manfaatnya. Mengingat operasional Organisasi Sektor Publik lebih mengutamakan pelayanan publik dibanding dengan investasi, maka penyusutan dari waktu ke waktu tidak lebih besar dari pada tambahan investasi Pemda. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi penurunan yang cukup drastis atas nilai aset tetap di neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem;



4. Selanjutnya dalam penghitungan penyusutan tanpa penggunaan *nilai residu* aset tetap. Setelah memperoleh nilai perolehan dan umur ekonomis, maka Penyusutan Tahun 2016 dihitung sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan 2016} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

5. Penyusutan aset yang diperoleh dalam Tahun 2016 dan tahun berikutnya dilakukan secara garis lurus sesuai dengan umur manfaat;
6. Terhadap aset tetap yang tidak digunakan, maka aset tersebut dipisahkan dan disajikan ke Aset Lain-lain sebesar nilai buku (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) dalam neraca.

#### **4.3.8 Pendapatan dalam Laporan Operasional**

1. Pendapatan dalam Laporan Operasional adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali; dan
2. Pendapatan dalam Laporan Operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

#### **4.3.9 Beban**

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa; dan
3. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah.

**BAB V**  
**Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**

**5.1 Penjelasan Pos Neraca**

**5.1.1 Aset Rp1.472.026.534.807,33**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016, dengan rincian sebagai berikut:

- Aset Lancar	Rp	204.507.613.188,10
- Investasi Jangka Panjang	Rp	100.690.653.166,02
- Aset Tetap	Rp	1.157.723.672.956,24
- Dana Cadangan	Rp	0,00
- Aset Lainnya	Rp	9.104.595.496,97
<b>- Jumlah Aset</b>	<b>Rp</b>	<b>1.472.026.534.807,33</b>

**5.1.1.1 Aset Lancar Rp204.507.613.188,10**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016, dengan rincian sebagai berikut:

- Kas di Kas Daerah	Rp	118.968.370.356,36
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	187.741.882,76
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
- Kas di Bendahara BLUD	Rp	3.131.930.393,54
- Kas di Bendahara FKTP Puskesmas	Rp	1.541.936.233,38
- Kas di Bendahara BOS	Rp	2.008.315.919,27
- Piutang	Rp	67.693.934.052,88
- Beban Dibayar Dimuka	Rp	45.270.833,33
- Persediaan	Rp	10.930.113.516,57
<b>- Jumlah Aset Lancar</b>	<b>Rp</b>	<b>204.507.613.188,10</b>

**5.1.1.1.1 Kas di Daerah Rp118.968.370.356,36**

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016 yang berada di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem. Rincian transaksi atas akun Kas di Kas Daerah sebagai berikut:

- Saldo awal	Rp	128.714.104.106,56
- Mutasi kredit rekening	Rp	1.457.378.856.577,66
- Mutasi debit rekening	Rp	(1.338.410.486.221,30)
<b>- Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>118.968.370.356,36</b>

Saldo akhir kas di Kas Daerah tersebut diatas telah tertuang dalam Rekonsiliasi Bank antara Bank BPD Bali dan Bagian Keuangan sebagai BUD dan SKPKD per 31 Desember 2016.

Saldo akhir Kas Daerah menurut rekening koran adalah Rp118.967.157.856,36, sedangkan menurut pembukuan adalah sebesar Rp118.968.370.356,36. Terdapat selisih sebesar Rp1.212.500,00 yang merupakan kesalahan penginputan pendapatan (*doubleinput*) oleh Bank sebesar Rp1.212.500,00 pada tanggal 27 Desember 2016. Atas nilai tersebut sudah dikoreksi oleh Bank pada tanggal 3 Maret 2017.

**5.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan Rp187.741.882,76**

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2016 yang terdiri dari:

- Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	Rp	25.452.230,00
- Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan	Rp	46.933,00
- Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan	Rp	<u>162.242.719,76</u>
- <b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>187.741.882,76</b>

Penerimaan/pendapatan yang ditangguhkan pada RSUD Kabupaten Karangasem, Puskesmas pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendapatan tersebut disebabkan pelayanan RSUD dan puskesmas masih berlangsung sampai tanggal 31 Desember 2016 dan pihak bank tidak melayani transaksi tunai pada tanggal tersebut. Disamping itu terdapat pendapatan retribusi JKBM Bulan Oktober 2016 Rp152.546.719,76 yang belum disetor dikarenakan dana tersebut masih di bendahara JKBM masing – masing puskesmas.

**5.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,00**

Tidak terdapat saldo pada rekening bank dan dipegang secara tunai oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

**5.1.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD Rp3.131.930.393,54**

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara BLU RSUD Kabupaten Karangasem per tanggal 31 Desember 2016. Jumlah tersebut sesuai dengan yang tertera pada Rekening Koran BLU RSUD Kabupaten Karangasem. Rincian transaksi atas akun Kas di BLU RSUD Kabupaten Karangasem sebagai berikut:

- Saldo awal	Rp	10.790.246.570,81
- Pendapatan BLUD	Rp	59.633.936.532,10
- Belanja BLUD	Rp	<u>(67.292.252.709,37)</u>
- <b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>3.131.930.393,54</b>

**5.1.1.1.5 Kas di Bendahara FKTP di Puskesmas Rp1.541.936.233,38**

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Puskesmas - Puskesmas di Kabupaten Karangasem sebagai penampung dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2016. Rincian transaksi atas Kas di Bendahara FKTP di Puskesmas sebagai berikut:

- Saldo awal	Rp	2.114.073.088,50
- Pendapatan FKTP	Rp	11.615.592.000,00
- Belanja FKTP	Rp	<u>(12.192.728.855,12)</u>
- Saldo akhir Kas di Bendahara FKTP di Puskesmas (SiLPA)	Rp	1.536.936.233,38
- Utang kepada rekanan	Rp	<u>5.000.000,00</u>
- <b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>1.541.936.233,38</b>

Rincian kas di Bendahara FKTP di Puskesmas dapat dilihat pada *lampiran 1*.

**5.1.1.1.6 Kas di Bendahara BOS Rp2.008.315.919,27**

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per tanggal 31 Desember 2016. Rincian transaksi Kas di Bendahara BOS sebagai berikut:

- Saldo awal	Rp	1.242.559.845,94
- Koreksi kesalahan pencatatan tahun lalu	Rp	175.686.420,99
- Saldo awal setelah koreksi	Rp	1.066.873.424,95
- Alokasi Dana BOS	Rp	69.496.200.802,62
- Belanja BOS	Rp	<u>(68.554.758.308,30)</u>
- <b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>2.008.315.919,27</b>

Rincian kas di Bendahara BOS dapat dilihat pada *lampiran 2*.

**5.1.1.1.7 Piutang Rp67.693.934.052,88**

Jumlah tersebut merupakan Saldo Piutang Bersih yang dapat Direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016, yang terdiri dari:

- Piutang Pajak	Rp	51.445.499.827,65
- Penyisihan Piutang Pajak	Rp	(16.924.984.803,22)
- Piutang Retribusi	Rp	809.957.726,00
- Penyisihan Piutang Retribusi	Rp	(8.109.477,26)
- Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Rp	103.612.800,00
- Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Rp	(1.036.128,00)
- Piutang Lainnya	Rp	32.854.852.419,15
- Penyisihan Piutang Lainnya	Rp	<u>(585.858.311,44)</u>
- <b>Jumlah Piutang</b>	<b>Rp</b>	<b>67.693.934.052,88</b>

**5.1.1.1.7.1 Piutang Pajak Rp51.445.499.827,65**

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016 yang sudah diterbitkan ketetapan pajak namun belum terealisasi pembayarannya. Rincian piutang pajak dapat dilihat pada *lampiran 3*.

**5.1.1.1.7.2 Penyisihan Piutang Pajak (Rp16.924.984.803,22)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016 yang diperkirakan tak tertagih. Termasuk dalam piutang pajak sebesar Rp353.087.332,00 untuk piutang pajak PBB-P2 dalam proses verifikasi ditemukan:

- WP sudah membayar tetapi status masih menunggak	Rp	129.373.414,00
- SPPT yang terbit atas nama "Pemilik"	Rp	128.358.212,00
- SPPT Double (terbit ganda)	Rp	23.348.368,00
- SPPT yang terbit diatas fasilitas umum	Rp	<u>72.007.338,00</u>
- <b>Jumlah Piutang</b>	<b>Rp</b>	<b>353.087.332,00</b>

Rincian perhitungan penyisihan piutang pajak dapat dilihat pada *lampiran 4*.

**5.1.1.1.7.3 Piutang Retribusi** **Rp809.957.726,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016, yang sudah diterbitkan ketetapannya namun belum terealisasi pembayarannya. Rincian piutang pajak dapat dilihat pada *lampiran 3*.

**5.1.1.1.7.4 Penyisihan Piutang Retribusi** **(Rp8.109.477,26)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Karangasem per tanggal 31 Desember 2016 yang diperkirakan tak tertagih. Rincian perhitungan penyisihan piutang retribusi dapat dilihat pada *lampiran 4*.

**5.1.1.1.7.5 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi** **Rp103.612.800,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada unit – unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem atas temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang belum ditindaklanjuti sampai dengan 31 Desember 2016.

Nilai Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi tersebut, berasal dari nilai temuan audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2009 dan 2013 yang sudah ditetapkan dalam SK Penetapan Pembebanan Kerugian Daerah.

Kasus kerugian daerah Tahun 2016 yang masih berupa informasi dan atau belum diproses penyelesaiannya atau berasal dari hasil pemeriksaan BPK sebesar Rp6.465.650.154,61 yang terdiri dari sisa angsuran dalam proses penyelesaian sebesar Rp721.693.155,00, pelunasan sampai Tahun 2016 Rp1.717.147.326,61 dan belum ditindaklanjuti sebesar Rp3.720.455.415,00 serta hasil pemeriksaan APIP sebesar Rp619.082.505,06 sudah dilakukan pelunasan sebesar Rp616.343.205,06 dan belum ditindaklanjuti sebesar Rp2.739.300,00.

Kerugian daerah yang disebabkan oleh Pihak Ketiga Tahun 2016 sebesar Rp641.662.670,42 seluruhnya telah dilunasi Rp641.662.670,42.

**5.1.1.1.7.6 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi** **(Rp1.036.128,00)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Karangasem per tanggal 31 Desember 2016. Rincian perhitungan penyisihan bagian lancar tuntutan perbendaharaan/ganti rugi dapat dilihat pada *lampiran 4*.

**5.1.1.1.7.7 Piutang lainnya** **Rp32.854.852.419,15**

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016. Rincian piutang lainnya dapat dilihat pada *lampiran 3*.

**5.1.1.1.7.8 Penyisihan Piutang lainnya** **(Rp585.858.311,44)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Karangasem per tanggal 31 Desember 2016. Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya dapat dilihat pada *lampiran 4*.

**5.1.1.1.8 Beban Dibayar Dimuka** **Rp45.270.833,33**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016. Rincian Beban Dibayar Dimuka yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada *lampiran 5*.

**5.1.1.1.9 Persediaan** **Rp10.930.113.516,57**

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016. Persediaan dimaksud merupakan Bahan Habis Pakai/Material yang terdiri dari alat tulis kantor, barang cetakan, barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, barang kuasi (karcis), material/bahan (termasuk didalamnya bibit hewan dan obat-obatan), bahan makanan pokok (sembako) dan peralatan/perlengkapan (termasuk didalamnya alat rumah tangga, alat listrik dan lain-lain). Rincian persediaan dapat dilihat pada *lampiran 6*.

Metode pencatatan untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan menggunakan metode perpetual. Proses tersebut sudah dilaksanakan pada RSUD Kabupaten Karangasem. Namun pada Dinas Kesehatan metode tersebut baru bisa diterapkan pada Tahun 2017 karena Peraturan Bupati Karangasem No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem ditetapkan tanggal 3 Mei 2016. Sehingga saldo akhir persediaan masih menggunakan nilai dengan harga terakhir. Hal itu dilaksanakan untuk keakuratan nilai saldo karena proses perubahan pencatatan belum bisa dilaksanakan pertengahan tahun. Namun secara volume persediaan obat-obatan sudah disajikan secara wajar.

Untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti ATK dll menggunakan metode periodik.

Selain itu juga terdapat persediaan yang kondisinya usang/kadaluwarsa pada tanggal pelaporan minimal sebesar Rp108.934.484,06 yang belum dihapuskan, yaitu:

No	Uraian	Jenis Persediaan	Jumlah
1	RSUD Karangasem	Obat dan Bahan Medis habis Pakai	Rp86.059.434,06
2	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB)	Alat Kontrasepsi	Rp22.875.050,00
<b>Jumlah</b>			<b>Rp108.934.484,06</b>

Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan penghapusan dan pemusnahan obat – obatan dan bahan medis habis pakai pada RSUD Kabupaten Karangasem sebesar Rp86.059.434,06 berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai Nomor: 442/496/RSUD/2017 tanggal 5 Januari 2017.

**5.1.1.2 Investasi Jangka Panjang** **Rp100.690.653.166,02**

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016, yang terdiri dari:

- Investasi Non Permanen	Rp	0,00
- Investasi Permanen	Rp	100.690.653.166,02
- <b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>Rp</b>	<b>100.690.653.166,02</b>

**5.1.1.2.1 Investasi Non Permanen Rp0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016 yang terdiri dari:

- Dana Bergulir	Rp	341.700.106,08
- Penyisihan Dana Bergulir	Rp	(341.700.106,08)
- Investasi Dalam Proyek Pembangunan	Rp	11.432.236.519,00
- Penyisihan Investasi Dalam Proyek Pembangunan	Rp	<u>(11.432.236.519,00)</u>
<b>- Jumlah Investasi Non Permanen</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

**5.1.1.2.1.1 Investasi Dana Bergulir Rp341.700.106,08**

Jumlah tersebut merupakan saldo dana bergulir per 31 Desember 2016 yang bersumber dari APBD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang disalurkan kepada kelompok usaha ekonomi produktif melalui dinas/instansi terkait, dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian.

Saldo Dana Bergulir merupakan Dana Bergulir yang terakhir kali diluncurkan pada Tahun 2009. Sejak Tahun 2010 Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang (UPK DB-UK INDAG) tidak lagi memberikan Bantuan Dana Bergulir kepada masyarakat dengan pertimbangan kondisi para pengguna dana bergulir terdahulu tidak mampu lagi mengangsur karena kesulitan likuiditas sehingga dana bergulir yang diberikan menjadi macet.

Berdasarkan rekomendasi Inspektorat Daerah Provinsi Bali yang tertuang dalam LHP Nomor 700.04/31/ITPROV tanggal 26 Juli 2010, sisa kas dana bergulir yang ditampung dalam rekening PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Karangasem sejumlah Rp41.428.931,00 disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem tanggal 30 Desember 2010. Selanjutnya pengembalian tunggakan pada Tahun 2011 sebesar Rp18.457.000,00, Tahun 2012 sebesar Rp19.050.000,00, Tahun 2013 sebesar Rp8.122.222,00, Tahun 2014 sebesar Rp20.007.544,00, Tahun 2015 sebesar Rp11.800.000,00 dan Tahun 2016 sebesar Rp9.507.000,00 langsung disetorkanke Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem dan diakuisebagai penerimaan pembiayaan.

Sesuai surat Nomor B-420P.1.14/Dek.3/4/2011 tanggal 20 April 2011 perihal permintaan keterangan, Kejaksaan Negeri Amlapura telah melakukan pemeriksaan atas penyaluran Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan putusan yang dituangkan dalam surat putusan No. 171/Pid.Sus/2011/PN.Ap tanggal 11 Januari 2012 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012. Salah satu hasil putusan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem dirugikan sebesar Rp120.350.000,00.

Atas saldo dari piutang tersebut telah dikurangi dengan penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih menurut *aging schedule* sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Karangasem.

**5.1.1.2.1.2 Penyisihan Investasi Dana Bergulir (Rp341.700.106,08)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Investasi Dana Bergulir di Dinas Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2016. Penyisihan tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014, dimana investasi non permanen disajikan sebesar nilai bersih

yang dapat direalisasikan. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan dimana jatuh tempo pada periode diatas 4 tahun disisihkan sebesar 100% dari nilai investasi.

#### **5.1.1.2.1.3 Investasi Dalam Proyek Pembangunan Rp11.432.236.519,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016 dalam Proyek Pembangunan Taman Ujung Karangasem sebesar Rp11.432.236.519,00 yang diukur dari Tahun 2009 dengan sisa umur investasi 21 tahun.

Pembangunan Taman Ujung Karangasem berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Karangasem dengan Puri Agung Karangasem melalui Akte Notaris Nomor 86 tanggal 30 Maret 2002. Jangka waktu perjanjian ditetapkan selama 30 tahun yang berakhir pada tanggal 11 Januari 2031. Semuabangunan yang dibangun/diperbaiki oleh Pemda Karangasem setelah berakhirnya perjanjian menjadi milik Puri Agung Karangasem. Sesuai dengan Keputusan Bersama Bupati Karangasem dan Puri Agung Karangasem No. 275 Tahun 2005 – No. 075 Tahun 2005, tanggal 4 Juli 2005 telah di tetapkan Dewan Pembina dan Badan Pengelola Obyek Wisata Taman Sukasada Ujung Kabupaten Karangasem.

Perjanjian Kerjasama pembagian hasil pengelolaan bersama diatur dalam akte notaris Nomor 22 tanggal 11 Januari 2001, dimana ketentuannya :

- Pemda Karangasem mendapat 60% dari keuntungan atau kerugian usaha bersama
- Puri Agung Karangasem mendapat 40% dari keuntungan atau kerugian usaha bersama

Pada Tahun 2016, pihak Pemda Karangasem telah memperoleh pembagian keuntungan sebesar Rp771.863.297,00. Seluruh pembagian keuntungan tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 30 Januari 2017.

#### **5.1.1.2.1.4 Penyisihan Investasi Dalam Proyek Pembangunan (Rp11.432.236.519,00)**

Jumlah tersebut merupakan penyisihan atas investasi non permanen dalam proyek pembangunan Taman Sukasada Ujung per 31 Desember 2016 yang didasarkan pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem dimana penyisihan atas penurunan nilai investasi dengan menggunakan metode *aging schedule*.

Sifat perjanjian Investasi dalam proyek pembangunan Taman Sukasada Ujung antara pihak Pemda Karangasem dengan Puri Karangasem merupakan investasi non permanen dalam jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan maka pengkapitalisasian atas belanja untuk Badan Pengelola dihentikan, dan akumulasi nilai investasi dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2009, sejak Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya perjanjian disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan memperhitungkan penyisihan penurunan investasi.



**5.1.1.2.2 Investasi Permanen** **Rp100.690.653.166,02**

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016 yang merupakan penyertaan modal pemerintah daerah di perusahaan-perusahaan daerah.

**5.1.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah** **Rp100.690.653.166,02**

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016 pada:

- PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Rp	36.300.000.000,00
- PDAM Kabupaten Karangasem	Rp	64.315.653.166,02
- PT. Jamkrida Bali Mandara	Rp	75.000.0000,00
<b>- Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>100.690.653.166,02</b>

**PT. Bank Pembangunan Daerah Bali** **Rp36.300.000.000,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali per 31 Desember 2016 yang disajikan berdasarkan metode biaya dikarenakan persentase kepemilikannya Pemerintah Kabupaten Karangasem sebesar 2,09% dari keseluruhan modal. Penyertaan pada BPD Bali sebesar Rp36.300.000.000,00 merupakan setoran modal Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada BPD Bali yang sudah disahkan. Nilai tersebut telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan tanggal 12 Februari 2016 yang dicatat dalam Akta Notaris I Made Widiada, SH Nomor 18 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pernyataan Keputusan RUPS.

Atas penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, pada Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Karangasem memperoleh bagian keuntungan sebesar Rp11.362.600.710,95 atas deviden Tahun 2015.

**PDAM Kabupaten Karangasem** **Rp64.315.653.166,02**

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada PDAM Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016 yang disajikan berdasarkan metode ekuitas karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten Karangasem sebesar 100% dari modal keseluruhan PDAM.

Pada Tahun 2016 terjadi penambahan Kekayaan Pemda yang dipisahkan sebesar Rp32.191.439.000,00 dari Rp23.709.108.648,68 pada Tahun 2015 menjadi Rp55.900.547.648,68 yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Kabupaten Karangasem sebesar Rp4.500.000.000,00. Serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah berupa Jaringan Air Bersih kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem sebesar Rp27.691.439.000,00. Penambahan juga terjadi pada modal hibah sebesar Rp160.872.491,00.

Perhitungan penyajian investasi sebagai berikut:

- Kekayaan Pemkab. Karangasem yang dipisahkan	Rp55.900.547.648,68
- Penyertaan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya	Rp5.680.195.396,00
- Modal Hibah	Rp1.210.350.266,00

- Cadangan Dana Sosial dan Pendidikan	Rp2.796.837.512,69
- Cadangan Umum	Rp2.796.837.512,69
- Cadangan Pensiun dan Sokongan	
- Akumulasi kerugian PDAM s.d. Tahun Lalu	(Rp5.040.727.964,72)
- Laba/Rugi PDAM Tahun Berjalan (Unaudit)	Rp971.612.794,68

---

**Nilai Investasi pada PDAM Karangasem** **Rp64.315.653.166,02**

Atas penyertaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2016 telah memperoleh pembagian keuntungan sebesar Rp2.229.110.486,41 yang ditransfer oleh PDAM Karangasem pada tanggal 31 Oktober 2016 ke Rekening Kas Daerah. Pembagian keuntungan tersebut didasarkan pada Surat Bupati Karangasem Nomor 900/2211/EK/Setda tanggal 5 September 2016 serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1976 yaitu 30% untuk Dana Pembangunan Daerah dan 25% untuk Anggaran dan Belanja Daerah dari Laba bersih PDAM. Perhitungan pembagian keuntungan tersebut diperoleh dari nilai laba Tahun 2015 berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Drs. Sri Marmo Djogosarkoro & Rekan Nomor: 55.a/A/V/2016 tertanggal 4 Mei 2016 sebesar Rp4.052.928.157,11 dikalikan 55% sesuai dengan ketentuan diatas.

**PT. Jamkrida Bali Mandara** **Rp75.000.000,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada PT. Jamkrida Bali Mandara per 31 Desember 2016. Penyertaan ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penempatan Saham Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.

PT. Jamkrida Bali Mandara didirikan dengan Akta No. 27 tanggal 21 November 2010 yang dibuat dihadapan I Made Pria Darsana, SH, M.Hum, Notaris di Badung dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: AHU – 59685.A.H.01.01 Tahun 2010 tertanggal 22 Desember 2010 dan mendapat Ijin Operasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-720/KM.10/2010, tertanggal 30 Desember 2010 tentang Pemberian Ijin Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT. Jamkrida Bali Mandara.

Perusahaan ini memiliki kegiatan usaha dalam bidang jasa penjaminan pembiayaan yaitu memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, menengah dan koperasi, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah, meningkatkan sumber pendapatan usaha daerah dan jasa konsultasi manajemen. Pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Karangasem memperoleh deviden sebesar Rp602.808,00 pada tanggal 14 April 2016.

**5.1.1.3 Aset Tetap** **Rp1.157.723.672.956,24**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah	Rp	181.910.839.355,50
- Peralatan dan Mesin	Rp	339.793.223.647,87
- Gedung dan Bangunan	Rp	653.990.016.583,23
- Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	1.025.249.503.645,70
- Aset Tetap Lainnya	Rp	35.170.716.869,98
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	3.716.599.980,00
- Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.082.107.227.126,04)
- <b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>Rp</b>	<b>1.157.723.672.956,24</b>

Pada Tahun 2016 telah dilakukan koreksi atas pencatatan Nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca atas:

1. Nilai aset tetap yang berada dibawah nilai kapitalisasi sesuai kebijakan akuntansi dikeluarkan dari daftar aset tetap skpd dan dipisahkan dalam buku *Extracomptable*;
2. Nilai aset tetap yang diperoleh setelah pengeluaran awal/renovasi/perbaikan/*overhaul* yang dicatat secara terpisah sudah dilakukan kapitalisasi terhadap aset induknyasehingga terjadi koreksi nilai penyusutan atas penerapan kebijakan akuntansi untuk aset jenis ini;

**5.1.1.3.1 Tanah Rp181.910.839.355,50**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016. Rincian mutasi Aset Tetap – Tanah Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun 2016 diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	<b>119.424.783.533,50</b>
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal	Rp	0,00
- Penilaian	Rp	70.741.075.850,00
- Mutasi masuk antar SKPD	Rp	10.000.000,00
Mutasi Kurang:		
- Koreksi Pencatatan	Rp	(8.255.020.028,00)
- Mutasi Keluar antar SKPD	Rp	(10.000.000,00)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>181.910.839.355,50</b>

Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki 575 ruas jalan. Dari 575 ruas tersebut baru terdata 523 tanah di bawah jalan, sehingga masih terdapat 52 ruas tanah di bawah jalan yang belum dilakukan pendataan untuk menambah nilai tanah sesuai dengan NJOP jalan.

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah untuk masing-masing Unit Pengguna Barang dapat dilihat pada lampiran 7.

**5.1.1.3.2 Peralatan dan Mesin Rp339.793.223.647,87**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016. Rincian mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun 2016 diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	<b>314.622.374.835,87</b>
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal	Rp	36.851.218.597,10
- Reklasifikasi dari aset lainnya	Rp	170.776.376,94
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	3.161.312.814,68
- Penerimaan Hibah	Rp	309.634.708,00
- Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp	775.636.333,00
- Mutasi Masuk antar SKPD	Rp	25.465.352.196,46
- Koreksi pencatatan	Rp	1.926.220.635,24
Mutasi Kurang:		
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	(331.315.806,00)
- Reklasifikasi ke aset lainnya	Rp	(1.075.840.100,67)
- Koreksi Pencatatan	Rp	(7.859.666.699,72)

- Kebijakan <i>Extracomtable</i>	Rp	(7.514.611.346,57)
- Mutasi Keluar antar SKPD	Rp	<u>(26.707.868.896,46)</u>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>339.793.223.647,87</b>

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin untuk tiap-tiap SKPD dapat dilihat pada *lampiran8*.

#### 5.1.1.3.3 Gedung dan Bangunan **Rp653.990.016.583,23**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016. Rincian mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun 2016 diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	<b>601.039.095.231,18</b>
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal	Rp	55.713.764.319,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	18.242.180.035,90
- Reklasifikasi dari aset lainnya	Rp	451.171.000,00
- Penerimaan Hibah	Rp	1.427.350.000,00
- Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp	7.039.158.855,00
- Mutasi Masuk antar SKPD	Rp	62.422.943.476,78
- Koreksi pencatatan	Rp	858.459.000,00
Mutasi Kurang:		
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	(999.337.714,92)
- Reklasifikasi ke aset lainnya	Rp	(1.498.845.500,00)
- Kapitalisasi	Rp	(646.412.900,00)
- Koreksi Pencatatan	Rp	(25.560.134.102,71)
- Penghapusan	Rp	(2.749.727.077,00)
- Kebijakan <i>Extracomtable</i>	Rp	(1.162.506.315,00)
- Mutasi Keluar antar SKPD	Rp	<u>(60.587.141.725,00)</u>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>653.990.016.583,23</b>

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan untuk tiap-tiap SKPD dapat dilihat pada *lampiran9*.

#### 5.1.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan **Rp1.025.249.503.645,70**

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016. Rincian mutasi Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun 2016 diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	<b>913.997.985.912,60</b>
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal	Rp	83.450.588.309,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	5.302.454.210,00
- Reklasifikasi dari aset lainnya	Rp	248.370.000,00
- Kapitalisasi	Rp	25.562.863.125,00
- Mutasi Masuk antar SKPD	Rp	80.365.000,00
Mutasi Kurang:		
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	(2.834.570.010,90)

- Reklasifikasi ke aset lainnya	Rp	(463.325.000,00)
- Penghapusan	Rp	(14.862.900,00)
- Mutasi Keluar antar SKPD	Rp	(80.365.000,00)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>1.025.249.503.645,70</b>

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi untuk tiap-tiap SKPD dapat dilihat pada *lampiran 10*.

#### 5.1.1.3.5 Aset Tetap Lainnya **Rp35.170.716.869,98**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun 2016 diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	<b>36.398.677.285,52</b>
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal	Rp	14.422.408.161,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	354.327.806,00
- Reklasifikasi dari aset lainnya	Rp	935.570,00
- Kapitalisasi	Rp	761.972.000,00
- Mutasi Masuk antar SKPD	Rp	1.292.776.531,00
- Koreksi pencatatan	Rp	173.691.687,40
Mutasi Kurang:		
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	(12.993.905.250,00)
- Reklasifikasi ke aset lainnya	Rp	(2.281.850.366,00)
- Koreksi Pencatatan	Rp	(1.533.857.263,94)
- Penjualan aset	Rp	(131.682.760,00)
- Mutasi Keluar antar SKPD	Rp	(1.292.776.531,00)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>35.170.716.869,98</b>

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya untuk tiap-tiap SKPD dapat dilihat pada *lampiran 11*.

#### 5.1.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan **Rp3.716.599.980,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016. Rincian mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun 2016 diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	12.644.696.215,00
Mutasi Tambah:		
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	215.505.000,00
- Kapitalisasi	Rp	839.534.000,00
- Mutasi masuk antar SKPD	Rp	2.826.331.000,00
Mutasi Kurang:		
- Reklasifikasi	Rp	(9.983.135.235,00)
- Mutasi keluar antar skpd		(2.826.331.000,00)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>3.716.599.980,00</b>

Rincian mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk tiap-tiap SKPD dapat dilihat pada *lampiran 12*.

**5.1.1.3.7 Akumulasi Penyusutan (Rp1.082.107.227.126,04)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan atas Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016. Akumulasi Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus tanpa mempertimbangkan nilai residu.

Untuk Tahun 2016, terdapat penyesuaian nilai penyusutan dilakukan dengan berlakunya Peraturan Bupati Karangasem No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem ditetapkan tanggal 3 Mei 2016 karena diterapkannya kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan awal aset serta atas aset yang mempunyai nilai dibawah batas kapitalisasi dicatat dalam daftar yang berbeda. Sehingga dalam penambahan dan pengurangan akumulasi penyusutan terdiri dari penyesuaian nilai akumulasi penyusutan untuk perubahan kebijakansebagaimana telah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada bagian Laporan Perubahan Ekuitas (5.2). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun 2016 diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	<b>1.010.588.426.892,46</b>
Mutasi Tambah:		
- Beban Penyusutan	Rp	112.128.869.125,96
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	327.539.600,00
- Reklasifikasi dari aset lain - lain	Rp	351.896.556,94
- Penerimaan Hibah	Rp	351.385.524,80
- Kapitalisasi	Rp	206.886.334,03
- Koreksi Pencatatan	Rp	11.795.656.694,41
- Mutasi Masuk antar SKPD	Rp	5.651.829.237,85
Mutasi Kurang:		
- Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	(697.298.009,01)
- Reklasifikasi ke aset lain - lain	Rp	(2.250.871.227,33)
- Penghapusan	Rp	(2.418.872.159,00)
- Koreksi Pencatatan	Rp	(24.262.092.710,84)
- Kapitalisasi	Rp	(17.847.930.683,86)
- Kebijakan <i>extracomtable</i>	Rp	(5.258.567.392,52)
- Mutasi Keluar antar SKPD	Rp	(6.559.630.657,85)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>1.082.107.227.126,04</b>

Rincian mutasi saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya untuk tiap-tiap SKPD dapat dilihat pada *lampiran 13*.

**5.1.1.4.1 Dana Cadangan Rp0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Cadangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016.

**5.1.1.5 Aset Lainnya Rp9.104.595.496,97**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016 yang terdiri dari:

- Aset Tidak Berwujud	Rp	0,00
- Tuntutan Ganti Rugi	Rp	0,00
- Tagihan Penjualan Angsuran	Rp	0,00
- Aset Lain-Lain	Rp	9.104.595.496,97
- <b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>Rp</b>	<b>9.104.595.496,97</b>

**5.1.1.5.1 Aset Tidak Berwujud Rp0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016.

**5.1.1.5.2 Tuntutan Ganti Rugi Rp0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Tuntutan Ganti Rugi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016.

**5.1.1.5.3 Tagihan Penjualan Angsuran Rp0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Tagihan Penjualan Angsuran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016.

**5.1.1.5.4 Aset Lain-Lain Rp9.104.595.496,97**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016, yang terdiri dari:

- Piutang Pajak yang Akan Dihapuskan	Rp	0,00
- Tagihan Tunggakan Taman Wisata Putung	Rp	0,00
- Tagihan Penjualan Angsuran Sepeda Motor	Rp	0,00
- Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Operasional/Akan Dihilangkan/Disertakan	Rp	1.806.752.406,64
- Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat	Rp	7.297.843.090,34
- <b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>Rp</b>	<b>9.104.595.496,97</b>

**Piutang Pajak yang Akan Dihapuskan Rp0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang pajak yang direncanakan akan dihapuskan per 31 Desember 2016 sebesar Rp940.631.736,44. Telah dilakukan upaya penagihan lebih dari tiga kali, namun sampai tanggal neraca (31 Desember 2016) belum dilakukan pelunasan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Atas tagihan tersebut telah dilakukan penyisihan piutang sebesar 100%, sehingga nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp0,00 (Rp940.631.736,44 - Rp940.631.736,44). Rincian Piutang Pajak yang akan Dihapuskan dapat dilihat pada *lampiran 14*.

**Tagihan Tunggakan Taman Wisata Putung Rp0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo tagihan atas tunggakan pembayaran sewa Taman Wisata Putung oleh PT. Panca Bahagia Rahayu sebesar Rp13.040.000,00. Telah dilakukan upaya penagihan lebih dari tiga kali, namun sampai tanggal neraca (31 Desember 2016) belum dilakukan pelunasan oleh yang bersangkutan. Atas tagihan tersebut telah dilakukan penyisihan piutang sebesar 100%, sehingga nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp0,00 (Rp13.040.000,00 - Rp13.040.000,00)

Taman Wisata Putung dikelola oleh pihak ke III (PT Panca Bahagia Rahayu) sesuai surat perjanjian Sewa Menyewa Nomor 024/21/Umum Tanggal 16 Mei 1998 untuk jangka waktu 25 Tahun (30 April 1986 s.d. 1 Mei 2011) dengan nilai sewa per tahun Rp3.260.000,00. Namun dalam pelaksanaannya pihak III (PT Panca Bahagia Rahayu) tidak memenuhi

kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga terdapat tunggakan sewa selama 4 tahun (2001 s.d. 2004), karena adanya pemutusan kontrak kerja sama dengan PT Panca Bahagia Rahayu sampai dengan saat penyusunan Laporan Keuangan ini belum ada penyelesaian tentang tunggakan sewa tersebut diatas.

**Tagihan Penjualan Angsuran Sepeda Motor Rp0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo tagihan penjualan secara angsuran atas sepeda motor kepada dua orang Kepala Desa pada Tahun 2002 sebesar Rp1.120.000,00. Telah dilakukan upaya penagihan lebih dari tiga kali, namun sampai tanggal neraca (31 Desember 2016) belum dilakukan pelunasan oleh yang bersangkutan. Atas tagihan tersebut telah dilakukan penyisihan piutang sebesar 100%, sehingga nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp0,00 (Rp1.120.000,00 - Rp1.120.000,00).

**Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Operasional/Akan Dihilangkan/Disertakan Rp1.806.752.406,64**

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dan akan dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada pihak Pihak Ketiga per 31 Desember 2016. Nilai tersebut diatas disajikan berdasarkan nilai buku aset tetap, dengan uraian sebagai berikut:

SKPD	Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	Tanah	60.905.000,00	0,00	60.905.000,00	Aset Milik Provnsi (butuh penelusuran)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Peralatan dan Mesin	1.441.764.255,00	1.409.434.249,00	32.330.006,00	Sekolah Swasta
	Gedung dan Bangunan	1.932.130.384,00	660.943.183,36	1.271.187.200,64	Sekolah Swasta
	Aset Tetap Lainnya	117.550.000,00	117.550.000,00	0,00	Sekolah Swasta
	Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	Rusak berat Sekolah Swasta
	Gedung dan Bangunan	415.543.000,00	23.212.800,00	392.330.200,00	Rusak berat Sekolah Swasta
<b>Jumlah</b>		<b>4.017.892.639,00</b>	<b>2.211.140.232,36</b>	<b>1.806.752.406,64</b>	

Rincian Aset Tetap pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang akan dihibahkan kepada Pihak sekolah swasta dapat dilihat pada *lampiran 14.a*

**Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat Rp7.297.843.090,34**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang tidak dapat digunakan lagi untuk kegiatan operasional pemerintahan per 31 Desember 2016. Nilai tersebut di atas disajikan berdasarkan nilai buku aset tetap, dengan uraian sebagai berikut:



<b>Aset Tetap</b>	<b>31 Desember 2015</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Tanah				0,00
Peralatan dan Mesin	7.280.636.521,87	1.371.751.900,00	357.694.681,83	8.294.693.740,04
Gedung dan Bangunan	11.528.946.664,12	1.498.845.500,00	801.374.562,09	12.226.417.602,03
Jalan Irigasi dan Jaringan	16.142.365.700,00	463.325.000,00	248.370.000,00	16.357.320.700,00
Aset Tetap Lainnya	411.180.360,42	2.055.159.366,00	20.415.570,00	2.445.924.156,42
Akumulasi Penyusutan	(30.609.893.708,40)	(2.625.379.973,17)	(1.208.760.573,42)	(32.026.513.108,15)
<b>Jumlah</b>	<b>4.753.235.538,00</b>	<b>2.763.701.792,83</b>	<b>219.094.240,50</b>	<b>7.297.843.090,34</b>

Rincian Aset Tetap dalam kondisi rusak berat tersebut dapat dilihat pada *lampiran 16*.

#### **5.1.2 Kewajiban Rp73.280.557.672,04**

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016 yang terdiri dari:

- Kewajiban Jangka Pendek	Rp	72.953.375.377,75
- Kewajiban Jangka Panjang	Rp	327.182.294,29
<b>- Jumlah Kewajiban</b>	<b>Rp</b>	<b>73.280.557.672,04</b>

#### **5.1.2.1 Kewajiban Jangka Pendek Rp72.953.375.377,75**

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban jangka Pendek yang harus dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016 yang terdiri dari:

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga	Rp	6.212.500,00
- Utang Bunga	Rp	647.662.353,01
- Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	Rp	19.171.070.518,64
- Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	38.047.708,33
- Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	53.090.382.297,77
<b>- Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>Rp</b>	<b>72.953.375.377,75</b>

#### **5.1.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Rp6.212.500,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016. Saldo tersebut terdiri dari kas yang masih tercatat pada buku kas umum bendahara FKTP pada Puskesmas Abang 2 yang merupakan utang kepada rekanan sebesar Rp5.000.000,00 dan kesalahan penginputan pendapatan retribusi oleh pihak Bank pada rekening kasda sebesar Rp1.212.500,00.

#### **5.1.2.1.2 Utang Bunga Rp647.662.353,01**

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Bunga Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016. Utang Bunga tersebut merupakan Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-1134/DP3/2000, tanggal 5 April 2000 serta pinjaman yang diperoleh dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada Tahun 2013 dalam rangka Pembiayaan Pembangunan Pasar Umum Amlapura Timur sesuai Perjanjian Investasi Nomor: 17 Tanggal 25 Mei 2012 serta Pusat Seni Kerajinan Tradisional di Kabupaten Karangasem serta Pembiayaan Pembangunan RSUD Type C di Kabupaten Karangasem sesuai Perjanjian Investasi Nomor: 8 Tanggal 8 Agustus 2012.

**5.1.2.1.3 Bagian Lancar Utang DN-Pemerintah Pusat Rp19.171.070.518,64**

Jumlah tersebut merupakan saldo Bagian Lancar Utang Dalam Negeri atas Utang kepada Pemerintah Pusat yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016. Utang tersebut yang jatuh tempo dan harus dilunasi pada Tahun 2016 yaitu tanggal (5 April dan 5 Oktober 2016) sesuai Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-1134/DP3/2000 tanggal 5 April 2000. Serta pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah yang jatuh tempo pada Bulan Januari, April, dan Juli 2017 sesuai Perjanjian Investasi Nomor: 17 Tanggal 25 Mei 2012 serta Bulan Maret, dan Juni 2017 sesuai Perjanjian Investasi Nomor: 8 Tanggal 8 Agustus 2012. Atas pinjaman kepada PIP akan berakhir pada Tahun 2017.

**5.1.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka Rp38.047.708,33**

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Pendapatan yang mempunyai masa manfaat s.d. 2016	Rp	144.492.000,00
- Pendapatan yang telah diakui sebelum Tahun 2016	Rp	60.666.858,33
- Diakui sebagai pendapatan Tahun 2016	Rp	<u>45.777.433,33</u>
<b>Sisa yang masih belum diakui sebagai pendapatan</b>	<b>Rp</b>	<b>38.047.708,33</b>

Rincian Pendapatan diterima dimuka tersebut dapat dilihat pada *lampiran 15*.

**5.1.2.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya Rp53.090.382.297,77**

Jumlah ini merupakan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem per tanggal 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Nilai
<b>A</b>	<b>Utang Belanja Pegawai</b>		
1	Dinas Pendapatan	Insentif Triwulan IV Tahun 2016.	Rp2.718.376.209,88
2	Dinas Kesehatan	Insentif Pemungutan Retribusi berupa Jaspel Pusk. Se-Kab. Karangasem	Rp902.283.600,00
4	RSUD Kabupaten Karangasem	Jasa Pelayanan (JKBM, JKNI, Umum, Farmasi, CI, Rujukan JKN dan Rujukan Jamkesmas) 2016	Rp6.521.912.948,46
5	Badan Lingkungan Hidup	Tambahan Insentif Triwulan IV	Rp3.250.000,00
6	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	Uang saku non PNS untuk Balai Penyuluhan KB	Rp45.000.000,00
7	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Tambahan beban kerja guru satu atap untuk bulan Oktober s.d Desember 2016 serta Tambahan Penghasilan Guru TA 2016	Rp386.350.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum	Insentif Pemungutan Retribusi	Rp60.500.000,00
<b>Total Utang Belanja Pegawai</b>			<b>Rp10.637.672.758,34</b>

No	Uraian	Nilai
<b>B Utang Belanja Persediaan</b>		
1	RSUD Kabupaten Karangasem	Rp74.310.000,00
	Barang cetak	Rp187.540.000,00
	Belanja Darah Siap Transfusi (PMI)	Rp7.104.750,00
	Belanja Premium Rujukan	Rp498.004.845,00
	Belanja BHP	Rp387.220.311,00
	Obat-obatan	Rp63.726.300,00
	Bahan Kimia/Lab	Rp55.200.000,00
	Gas Medis	Rp38.551.700,00
	Gas Medis Liquid	Rp1.358.500,00
	ATK IT	Rp1.313.016.406,00
<b>Total Utang Belanja Persediaan</b>		<b>Rp2.040.454.432,00</b>
<b>C Utang Belanja Jasa</b>		
1	RSUD Kabupaten Karangasem	Rp29.377.500,00
	Belanja Rujukan Parsial	Rp404.454.600,00
	Sampah Medis	<b>Rp433.832.100,00</b>
2	Dinas Kesehatan	Rp68.880.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat serta fotocopy	Rp65.042.000,00
3	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	Rp65.042.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, air dan listrik	Rp7.885.200,00
4	Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran	Rp7.885.200,00
	Upah Pungut Retribusi Parkir (Non PNS)	Rp6.511.828.501,43
5	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	Rp6.511.828.501,43
	Kewajiban sharing JKBM Kabupaten Karangasem tahun 2016	<b>Rp7.087.467.801,43</b>
<b>Total Utang Belanja Jasa</b>		<b>Rp7.087.467.801,43</b>
<b>D Utang Belanja Pemeliharaan</b>		
1	RSUD Kabupaten Karangasem	Rp5.637.500,00
	Pemeliharaan Lift	<b>Rp5.637.500,00</b>
<b>Total Utang Belanja Pemeliharaan</b>		<b>Rp5.637.500,00</b>
<b>E Utang Belanja Perjalanan Dinas</b>		
1	Dinas Kesehatan	Rp3.495.000,00
<b>Total Utang Belanja Perjalanan Dinas</b>		<b>Rp3.495.000,00</b>
<b>F Utang Belanja Modal</b>		
1	Dinas Kesehatan	Rp5.302.407.681,00
	BM Bangunan dan Gedung	

No	Uraian		Nilai
		BM Peralatan dan Mesin	Rp180.629.000,00
		Total	<b>Rp5.483.036.681,00</b>
2	RSUD	BM Bangunan dan Gedung	Rp890.470.000,00
3	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	BM Bangunan dan Gedung	Rp132.846.000,00
		BM Peralatan dan Mesin	Rp280.467.000,00
		Total	<b>Rp413.313.000,00</b>
4	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	BM Peralatan dan Mesin	Rp204.000.000,00
5	Dinas Pendidikan	BM Aset Tetap Lainnya	Rp761.972.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum	BM Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp25.562.863.125,00
<b>Total Utang Belanja Modal</b>			<b>Rp33.315.654.806,00</b>
<b>Jumlah Keseluruhan</b>			<b>Rp53.090.382.297,77</b>

Utang Jangka Pendek tersebut diatas akan direalisasikan pembayarannya dalam kegiatan masing – masing SKPD Tahun Anggaran 2017.

Pada Tahun 2016 terjadi pemotongan Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut menyebabkan beberapa kegiatan fisik dan non fisik pada SKPD pengelola Dana DAK tidak dapat direalisasikan anggarannya namun progres kegiatan sudah berjalan. Sehingga pada Tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem berkewajiban untuk membayar utang jangka pendek dari kegiatan yang bersumber dari Dana DAK sebesar Rp34.225.509.832,00.

Pemerintah Kabupaten Karangasem per tanggal 31 Desember 2016, masih menguasai uang jaminan reklamasi yang diberikan oleh para Penambang Galian C yang beroperasi di Kabupaten Karangasem sebesar Rp1.455.373.750,00. Uang tersebut dapat dicairkan ketika para penambang tersebut telah memenuhi kewajibannya dalam mereklamasi daerah tambangnya. Rincian dana jaminan reklamasi tersebut dapat dilihat pada *lampiran 17*.

#### 5.1.2.2 **Kewajiban Jangka Panjang** **Rp327.182.294,29**

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka panjang Pemerintah kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016 yang merupakan utang dalam negeri dari pemerintah pusat yang telah diterima.

#### 5.1.2.2.1 **Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat** **Rp327.182.294,29**

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016, dengan rincian sebagai berikut:

- Utang atas Pembangunan Terminal Karang Sokong	Rp	327.182.294,29
<b>Sisa yang masih belum dibayar</b>	<b>Rp</b>	<b>327.182.294,29</b>

Rincian penjelasan ketiga jenis utang tersebut yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Karangasem menarik pinjaman kepada pemerintah pusat melalui Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman untuk membiayai pembangunan Terminal Karang Sokong. Perjanjian Pinjaman No. SLA-1134/DP3/2000, tanggal 5 April 2000, dengan uraian sebagai berikut:

- Plafond Pinjaman : Rp2.260.000.000,00
- Jumlah Penarikan : Rp2.224.839.000,00
- Jangka Waktu pinjaman : 20 tahun – masa tenggang3 tahun
- Bunga : 11,75% per tahun
- Biaya Komitmen : 0,75% per tahun dihitung 30 hari sejak perjanjian ditanda tangani (5 April 2000)
- Jatuh Tempo Angsuran : 5 April dan 5 Oktober (5-10-2003 s.d. 5-04-2020)
- Pokok Angsuran : Rp65.436.458,82 (selama 34 kali angsuran)
- Denda : 2% / tahun, setiap terjadi kelambatan pembayaran
- Closing date : 31 Desember 2020

Dari pokok pinjaman tersebut, sampai dengan 31 Desember 2016 telah dilaksanakan pelunasan sebesar Rp1.766.784.388,98 sehingga saldo pokok utang yang masih harus dibayar sebesar Rp327.182.294,29 setelah dipindahkan ke Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat sebesar Rp130.872.917,64 untuk rencana pembayaran di Tahun 2017.

2. Pada Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Karangasem memperoleh pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk membiayai dua (2) proyek pembangunan yaitu :

a. Perjanjian Investasi dalam bentuk Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah dalam rangka Pembangunan Pasar Umum Amlapura Timur serta Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional di Kabupaten Karangasem Nomor: 17 tanggal 25 Mei 2012 dengan uraian sebagai berikut:

- Plafond Pinjaman : Rp49.870.000.000,00
- Jumlah Penarikan : Rp46.992.821.000,00
- Jangka Waktu pinjaman : 5 tahun termasuk masa tenggang – masa tenggang 15 bulan
- Bunga : 7,75% per tahun dihitung sejak pencairan pertama
- Pembayaran bunga pertama : tanggal terakhir di bulan ketiga sejak penarikan pertama
- Pembayaran bunga berikutnya: setiap 3 bulan pada tanggal terakhir bulan jatuh tempo
- Bunga pada masa tenggang : tetap dibayarkan
- Biaya Up Front Fee : 0,50% dari jumlah pinjaman
- Biaya Manajement Fee : 0,50% dari jumlah pinjaman
- Biaya administration Fee : 0,50% dari jumlah pinjaman
- Denda keterlambatan : 2% per bulan ( hutang pokok dan bunga )

Dari pokok pinjaman tersebut, sampai dengan 31 Desember 2016 telah dilakukan pembayaran pokok utang sebesar Rp36.456.875.000,00 dan pokok utang pada Tahun 2017 harus dibayar seluruhnya sesuai perjanjian setelah dipindahkan ke Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat sebesar Rp13.340.321.000,00 untuk rencana pembayaran di Tahun 2017.

b. Perjanjian Investasi dalam bentuk Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah dalam rangka Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C di Kabupaten Karangasem Nomor: 08 tanggal 08 Agustus 2012 dengan uraian sebagai berikut :

- Plafond Pinjaman : Rp46.000.000.000,00
- Jumlah Penarikan s.d th 2012 : Rp6.644.467.500,00
- Jangka Waktu pinjaman : 5 tahun termasuk masa tenggang – masa tenggang 15 bulan
- Bunga : 7,75% per tahun dihitung sejak pencairan pertama
- Pembayaran bunga pertama : tanggal terakhir di bulan ketiga sejak penarikan pertama
- Pembayaran bunga berikutnya : setiap 3 bulan pada tanggal terakhir bulan jatuh tempo
- Bunga pada masa tenggang : tetap dibayarkan
- Biaya Up Front Fee : 0,50% dari jumlah pinjaman
- Biaya Manajemen Fee : 0,50% dari jumlah pinjaman
- Biaya administration Fee : 0,50% dari jumlah pinjaman
- Denda keterlambatan : 2% per bulan ( hutang pokok dan bunga )

Dari pokok pinjaman tersebut, sampai dengan 31 Desember 2016 telah dilakukan pembayaran pokok utang sebesar Rp40.300.000,00 sehingga tidak ada sisa pokok utang pada tahun 2017 sesuai batas jatuh tempo perjanjian setelah dipindahkan ke Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat sebesar Rp5.699.876.601,00 untuk rencana pembayaran di Tahun 2017.

**5.1.3 Ekuitas Rp1.398.745.977.135,29**

Jumlah tersebut merupakan saldo ekuitas milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016. Rincian perhitungan nilai ekuitas dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Keuangan bagian penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (5.2.4)

**5.2 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas**

**5.2.1 Ekuitas Awal Rp1.227.911.800.367,30**

Jumlah tersebut merupakan ekuitas awal Tahun 2016 sebesar Rp1.227.911.800.367,30 yang merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2015 setelah audit BPK RI.

**5.2.2 Surplus/(Defisit) – LO Rp91.235.756.013,36**

Jumlah tersebut merupakan surplus Laporan Operasional Tahun 2016 sebesar Rp91.235.756.013,36. Surplus laporan operasional terjadi disebabkan transaksi-transaksi yang terjadi pada Tahun 2016 baik yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas.

**5.2.3 Dampak Kumulatif Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp79.598.420.754,63**

Jumlah tersebut merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Tahun 2016 yang terdiri dari:

**5.2.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Rp46.947.170.336,78**

Jumlah tersebut merupakan dampak kumulatif atas adanya perubahan penerapan kebijakan akuntansi dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual terhadap akun-akun yang terdapat di Neraca, dengan uraian sebagai berikut:

Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
Koreksi Penyisihan Piutang	Rp	0,00
Penyesuaian Akumulasi Aset Tetap	Rp	21.411.308.571,48
Penyesuaian Akumulasi Aset Tetap pada Aset Lainnya	Rp	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	25.535.861.765,30
<b>Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan</b>	<b>Rp</b>	<b>46.947.170.336,78</b>

Pada Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Karangasem telah melakukan perubahan atas kebijakan akuntansi berbasis akrual yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Karangasem Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk penyempurnaan pada kebijakan akuntansi beberapa akun. Diantaranya akun piutang, persediaan, investasi dan aset. Atas perubahan kebijakan tersebut sudah bisa dilaksanakan pada pelaporan Tahun 2015 kecuali untuk akun aset. Hal tersebut mempunyai dampak kebijakan terhadap ekuitas yang telah disajikan sebelumnya dalam laporan keuangan Tahun 2015, perubahan kebijakan tersebut yaitu:

1. Penerapan kebijakan kapitisasi aset tetap kategori peralatan dan mesin untuk nilai dibawah Rp500.000,00 dikecualikan untuk *meubelair* dibawah Rp300.000,00 yang sebelumnya masih tercatat dalam daftar aset tetap SKPD.
2. Penerapan kebijakan kapitalisasi aset tetap kategori gedung dan bangunan dengan tahun perolehan mulai dari Tahun 2010 untuk nilai dibawah Rp50.000.000,00 yang sebelumnya masih tercatat dalam daftar aset tetap SKPD.
3. Penerapan kebijakan pengeluaran setelah perolehan (*subsequent Expenditures*) untuk aset tetap gedung dan bangunan dengan nilai 15% keatas dari nilai perolehan mulai Tahun 2010.
4. Penerapan kebijakan atas aset tetap berupa aset tetap lainnya tidak disusutkan yang sebelumnya dilakukan penyusutan atas aset tetap tersebut.

**5.2.3.2 Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar Rp32.651.250.417,85**

Jumlah tersebut merupakan dampak kumulatif atas terjadinya kesalahan pencatatan pada periode sebelumnya dan dilakukan koreksi pencatatan pada tahun pelaporan, dengan uraian sebagai berikut:

Koreksi Nilai Persediaan	Rp	
Koreksi Kesalahan Pencatatan Piutang	Rp	(40,00)
Koreksi Penyisihan Piutang	Rp	54.494,10
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	32.651.195.963,75
<b>Jumlah Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar</b>	<b>Rp</b>	<b>32.651.250.417,85</b>

**5.2.4 Ekuitas Akhir Rp1.398.745.977.135,29**

Jumlah tersebut merupakan saldo ekuitas akhir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Tahun 2016 atas kegiatan operasionalnya. Nilai ekuitas akhir ini sama dengan nilai ekuitas yang terdapat di neraca per 31 Desember 2016 (5.1.3).

**5.3 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran**

**5.3.1 Pendapatan Daerah Rp1.462.024.348.855,80**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun Anggaran (TA) 2016, yang terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah	Rp	232.644.013.229,58
- Pendapatan Transfer	Rp	1.089.762.594.070,39
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp	139.617.741.555,83
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.462.024.348.855,80</b>

**5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah Rp232.644.013.229,58**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun Anggaran (TA) 2016, yang terdiri dari:

- Pendapatan Pajak Daerah	Rp	117.782.188.084,34
- Pendapatan Retribusi Daerah	Rp	15.984.975.219,86
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	13.592.314.005,36
- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp	85.284.535.920,02
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>232.644.013.229,58</b>

**5.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Rp117.782.188.084,34**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016. Realisasi tersebut dibawah anggaran sebesar Rp1.056.177.090,66 atau 99,11%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	Pajak Hotel	18.894.646.000,00	19.927.435.208,27	1.032.789.208,27	105,47
2	Pajak Restaurant	8.857.109.000,00	9.273.301.616,63	416.192.616,63	104,70
3	Pajak Hiburan	54.449.500,00	56.079.988,00	1.630.488,00	102,99
4	Pajak Reklame	472.213.000,00	525.800.800,00	53.587.800,00	111,35
5	Pajak Penerangan Jalan	10.800.000.000,00	11.111.035.151,00	311.035.151,00	102,88
6	Pajak Mineral bukan logam dan batuan	62.264.941.675,00	58.011.724.895,00	(4.253.216.780,00)	93,17
7	Pajak Parkir	108.245.000,00	119.431.500,00	11.186.500,00	110,33
8	Pajak Air Tanah	900.000.000,00	1.048.161.861,44	148.161.861,44	116,46
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.541.761.000,00	6.976.571.332,00	434.810.332,00	106,65
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan	9.945.000.000,00	10.732.645.732,00	787.645.732,00	107,92
<b>Jumlah</b>		<b>118.838.365.175,00</b>	<b>117.782.188.084,34</b>	(1.056.177.090,66)	99,11

Penerimaan Pajak Daerah lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan disebabkan karena:

1. Realisasi Pajak Hotel melebihi target disebabkan karena adanya pelunasan pajak pada tahun sebelumnya, secara umum kondisi Pariwisata Bali masih sangat diminati sebagai destinasi Wisata Internasional dengan ditunjang keamanan yang kondusif;



2. Realisasi Pajak Restoran melebihi target yang ditetapkan disebabkan jumlah WP yang meningkat karena adanya Restoran/Rumah Makan baru;
3. Realisasi Pajak Hiburan melebihi target yang ditetapkan disebabkan karena adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat pagelaran massal seperti kegiatan 17 Agustus-an dan kegiatan konser-konser musik;
4. Realisasi Pajak Reklame melebihi target yang ditetapkan disebabkan banyaknya penggunaan reklame/iklan-iklan oleh Wajib Pajak;
5. Realisasi Pajak Penerangan Jalan melebihi target yang ditetapkan disebabkan meningkatnya konsumsi listrik untuk industri dan masyarakat pada Wajib Pajak PLN disamping adanya penambahan untuk konsumen baru;
6. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak mencapai target yang ditetapkan;
7. Realisasi Pajak Parkir melebihi target yang ditetapkan karena satu-satunya Wajib Pajak parkir yaitu Hardy's Amlapura dimana kondisi parkirnya meningkat sehingga pembayaran pajak tahun 2016 juga mengalami peningkatan;
8. Realisasi Pajak Air Tanah melampaui target karena adanya kenaikan penggunaan volume air tanah oleh para Wajib Pajak; dan
9. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melebihi target yang ditetapkan disebabkan karena Pajak Bumi dan Bangunan sudah dikelola langsung oleh Dinas Pendapatan dan sudah menggunakan aplikasi sehingga data pajak bumi dan bangunan yang diperoleh lebih akurat

#### 5.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

**Rp15.984.975.219,86**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016. Realisasi tersebut melebihi anggaran sebesar Rp2.024.970.219,86 atau 114,51%, dengan rincian penerimaan retribusi sebagai berikut:

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
<b>I.</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>6.887.030.000,00</b>	<b>7.264.228.342,00</b>	<b>377.198.342,00</b>	<b>105,48</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000,00	3.269.373.500,00	269.373.500,00	108,98
2	Retribusi Pelayanan Persampahan & Kebersihan	345.000.000,00	343.687.000,00	(1.313.000,00)	99,62
3	Retribusi Parkir Ditepi Jalan umum	292.225.000,00	246.885.000,00	(45.340.000,00)	84,48
4	Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran	379.440.000,00	578.657.000,00	199.217.000,00	152,50
5	Retribusi Pelayanan Pasar – Los	1.075.365.000,00	914.131.000,00	(161.234.000,00)	85,01
6	Retribusi Pelayanan Pasar – Kios	1.000.000.000,00	1.142.266.500,00	142.266.500,00	114,23
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	245.000.000,00	325.296.300,00	80.296.300,00	132,77
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.000.000,00	51.915.000,00	1.915.000,00	103,83
9	Retribusi Pengendalian Menara & Telekomunikasi	500.000.000,00	392.017.042,00	(107.982.958,00)	78,40
<b>II.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>3.934.975.000,00</b>	<b>3.791.192.900,00</b>	<b>(143.782.100,00)</b>	<b>96,35</b>
1	<i>Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah &amp; Bangunan</i>	<i>178.250.000,00</i>	<i>228.094.900,00</i>	<i>49.844.900,00</i>	<i>127,96</i>
	a. Sewa tanah dan bangunan diparda	9.360.000,00	20.437.900,00	11.077.900,00	218,35
	b. Sewa Tanah Disperindag	110.000.000,00	125.967.000,00	15.967.000,00	114,52
	c. Sewa Kantin dan Sewa Tempat ATM	58.890.000,00	81.690.000,00	22.800.000,00	138,72
2	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah – Ruangan	1.500.000,00	4.350.000,00	2.850.000,00	290,00
3	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	60.000.000,00	78.575.000,00	18.575.000,00	130,96

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
	– Kendaraan Bermotor/ Alat Berat				
4	Retribusi Terminal	155.625.000,00	153.539.000,00	(2.086.000,00)	98,66
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	155.375.000,00	179.591.000,00	24.216.000,00	115,59
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	32.000.000,00	45.376.000,00	13.376.000,00	141,80
7	<i>Retribusi Tempat Rekreasi olah raga</i>	<i>3.327.725.000,00</i>	<i>3.077.005.000,00</i>	<i>(250.720.000,00)</i>	<i>92,47</i>
	a. Ret. Tempat Rekreasi Olahraga Diparda	3.322.925.000,00	3.073.905.000,00	(249.020.000,00)	92,51
	b. Ret. Tempat Olahraga Disdikpora	4.800.000,00	3.100.000,00	(1.700.000,00)	64,58
8	<i>Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah</i>	<i>24.500.000,00</i>	<i>24.662.000,00</i>	<i>162.000,00</i>	<i>100,66</i>
	a. Penjualan Produksi Usaha Daerah Distan	12.000.000,00	12.005.000,00	5.000,00	100,04
	b. Penjualan Produksi Usaha Daerah Disnak	12.500.000,00	12.657.000,00	157.000,00	101,26
<b>III.</b>	<b>Retribusi Perijinan Tertentu</b>	<b>3.138.000.000,00</b>	<b>4.929.553.977,86</b>	<b>1.791.553.977,86</b>	<b>157,09</b>
1	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	2.500.000.000,00	4.390.567.500,00	1.890.567.500,00	175,62
2	Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	70.000.000,00	73.500.000,00	3.500.000,00	105,00
3	Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian	220.000.000,00	207.965.477,86	(12.034.522,14)	94,53
4	Retribusi Ijin Trayek/Insidentil	6.000.000,00	5.695.000,00	(305.000,00)	94,92
5.	Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	342.000.000,00	251.826.000,00	(90.174.000,00)	73,63
	<b>Jumlah</b>	<b>13.960.005.000,00</b>	<b>15.984.975.219,86</b>	<b>2.024.970.219,86</b>	<b>114,51</b>

Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp15.984.975.219,86 atau 114,51% dibandingkan anggarannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2016 sebesar Rp7.264.228.342,00 dibandingkan anggarannya sebesar Rp6.887.030.000,00 menunjukkan realisasi diatas anggaran sebesar Rp377.198.342,00 atau 105,48% yang utamanya disebabkan:

- Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan lebih tinggi dari yang dianggarkan disebabkan oleh banyaknya jumlah kunjungan pasien di puskesmas;
- Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor lebih tinggi dari jumlah yang dianggarkan disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan yang diuji;
- Penerimaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan karena masyarakat banyak menggunakan jasa penyedotan Kakus; dan
- Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan.

#### 2. Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2016 sebesar Rp3.791.192.900,00 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp3.934.975.000,00 menunjukkan realisasi dibawah anggaran sebesar Rp143.782.100,00 atau 96,35% yang utamanya disebabkan:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasinya lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan yang disebabkan retribusi sewa alat berat Dinas PU, retribusi sewa tanah Dinas Perindustrian dan Perdagangan lebih tinggi dari yang ditetapkan karena masyarakat yang membutuhkan jasa tersebut pada Tahun 2016 meningkat serta adanya realisasi sewa tempat ATM pada Bagian Perlengkapan;

- b. Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan realisasinya lebih tinggi dari yang dianggarkan; dan
  - c. Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah realisasinya lebih tinggi dari yang dianggarkan disebabkan realisasi penjualan produksi usaha daerah pada Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan lebih tinggi dari yang dianggarkan.
3. Retribusi Perijinan Tertentu
- Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp4.929.553.977,86 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp3.138.000.000,00 menunjukkan realisasi diatas anggaran sebesar Rp1.791.553.977,86 atau 157,09% yang utama disebabkan:
- a. Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) melebihi anggaran yang ditetapkan disebabkan meningkatnya jumlah ijin untuk mendirikan bangunan dari masyarakat;
  - b. Penerimaan Retribusi Ijin Gangguan lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan;
  - c. Penerimaan retribusi izin tempat penjualan minuman Beralkohol realisasinya lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan;
  - d. Pendapatan Retribusi Ijin Trayek lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan;
  - e. Retribusi perijinan mmpekerjakan tenaga kerja asing lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan

**5.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp13.592.314.005,36**

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016. Realisasi pendapatan dari TA 2016 sebesar Rp13.592.314.005,36 telah melebihi target dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp602.808,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem	2.229.110.486,41	2.229.110.486,41	0,00	100,00
2	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	11.362.600.710,95	11.362.600.710,95	0,00	100,00
3	PT Jamkrida Bali Mandara	0,00	602.808,00	602.808,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.591.711.197,36</b>	<b>13.592.314.005,36</b>	<b>602.808,00</b>	<b>100,00</b>

**5.3.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp85.284.535.920,02**

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah selama TA 2016 adalah sebesar Rp85.284.535.920,02 dibandingkan anggarannya sebesar Rp82.955.603.137,90 menunjukkan realisasi diatas anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.328.932.782,12 atau 102,81% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	41.200.000,00	189.311.060,00	148.111.060,00	459,49
2	Jasa Giro	5.710.438.178,27	6.779.915.281,30	1.069.477.103,03	118,73
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	254.953.102,40	254.953.102,40	0,00
4	Komisi atas Pengelolaan Tanah Aset Pemprov Bali	10.000.000,00	7.951.460,00	(2.048.540,00)	79,51
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	775.019.910,98	775.019.910,98	0,00
6	Pendapatan Denda Pajak	305.600.000,00	720.559.758,19	414.959.758,19	235,79

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
7	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	2.086.205,42	2.086.205,42	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	4.432.762.248,63	4.509.749.898,63	76.987.650,00	101,74
9	Pendapatan dari BLUD	61.000.000.000,00	59.633.936.532,10	(1.366.063.467,90)	97,76
10	Pendapatan Hasil Pengelolaan Investasi Non Permanen	795.210.711,00	795.210.711,00	0,00	100,00
11	Pendapatan Denda Administratif	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
12	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP	10.660.392.000,00	11.615.592.000,00	955.200.000,00	108,96
<b>Jumlah</b>		<b>82.955.603.137,90</b>	<b>85.284.535.920,02</b>	<b>2.328.932.782,12</b>	<b>102,81</b>

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan disebabkan karena:

1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan disebabkan adanya realisasi dari Penjualan Aset daerah;
2. Meningkatnya penerimaan Jasa Giro karena meningkatnya PAD dan kebijakan *autodebet* masing-masing rekening Giro SKPD;
3. Tindak Lanjut Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang semakin tinggi;
4. Penerimaan Komisi atas pengelolaan tanah aset Pemerintah Provinsi Bali lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan;
5. Adanya penerimaan pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
6. Kesadaran Wajib Pajak meningkat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran pajak;
7. Adanya penerimaan pendapatan denda retribusi;
8. Pendapatan BLUD lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan;
9. Adanya pendapatan denda administratif bidang perpajakan; dan
10. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama realisasinya lebih tinggi dari yang dianggarkan.

#### 5.3.1.2 **Pendapatan Transfer** **Rp1.089.762.594.070,39**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016, yang terdiri dari:

- Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	Rp	937.628.021.592,00
- Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	Rp	49.301.984.000,00
- Transfer Pemerintah Provinsi	Rp	102.832.588.478,39
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp</b>	<b>1.089.762.594.070,39</b>

#### 5.3.1.2.1 **Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan** **Rp937.628.021.592,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016, yang terdiri dari:

- Dana Bagi Hasil Pajak	Rp	21.458.384.197,00
- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	Rp	989.021.895,00
- Dana Alokasi Umum	Rp	732.963.859.000,00
- Dana Alokasi Khusus	Rp	182.216.756.500,00
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>Rp</b>	<b>937.628.021.592,00</b>

**5.3.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak Rp21.458.384.197,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016. Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat selama TA 2016 adalah sebesar Rp21.458.384.197,00 dibanding anggaran yang ditetapkan sebesar Rp21.596.966.000,00 menunjukkan realisasi dibawah anggaran sebesar Rp138.581.803,00 atau 70,30%. dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih /Kurang	%
1	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan	3.473.321.000,00	4.896.556.904,00	1.423.235.904,00	140,98
2	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (termasuk PPh Ps.21)	14.488.600.000,00	12.958.530.599,00	(1.530.069.401,00)	89,44
3	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan	33.454.000,00	31.158.450,00	(2.295.550,00)	93,14
4	Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan	1.626.000,00	1.517.958,00	(108.042,00)	93,36
5	Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan	120.602.000,00	66.075.000,00	(54.527.000,00)	54,79
6	Bagi Hasil dari PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kab/Kota	3.479.363.000,00	3.504.545.286,00	25.182.286,00	100,72
<b>Jumlah</b>		<b>21.596.966.000,00</b>	<b>21.458.384.197,00</b>	<b>(138.581.803,00)</b>	<b>99,36</b>

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak yang lebih rendah dari anggaran disebabkan oleh:

1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukkan realisasi diatas anggaran yang ditetapkan karena meningkatnya bagi hasil pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan; dan
2. Penerimaan Pajak Penghasilan pribadi (termasuk PPh Ps. 21) menunjukkan realisasi dibawah anggaran yang ditetapkan.

**5.3.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Rp989.021.895,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016. Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak untuk TA 2016 adalah sebesar Rp989.021.895,00 dibandingkan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.618.176.622,07 menunjukkan realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dibawah anggaran sebesar Rp629.154.727,07 atau 61,12% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih /Kurang	%
1	Sumber Daya Alam (Perikanan)	1.089.194.000,00	452.025.539,00	(637.168.461,00)	41,50
2	Bea Cukai Hasil Tembakau	528.982.622,07	536.996.356,00	8.013.733,93	101,51
<b>Jumlah</b>		<b>1.618.176.622,07</b>	<b>989.021.895,00</b>	<b>(629.154.727,07)</b>	<b>61,12</b>

Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp989.021.895,00 atau 61,12% dibandingkan anggarannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam (Perikanan) menunjukkan realisasi sebesar Rp452.025.539,00 atau 41,50% dibandingkan anggarannya disebabkan karena sangat tergantung pada besarnya pendapatan Sumber Daya Alam yang diterima oleh Pemerintah Pusat; dan
2. Penerimaan Bagi Hasil Bea Cukai Tembakau menunjukkan realisasi diatas anggaran yang ditetapkan.

**5.3.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum Rp732.963.859.000,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016. Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum TA2016 adalah sebesar Rp732.963.859.000,00 dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp679.878.442.612,00 menunjukkan realisasi diatas anggaran sebesar Rp53.085.416.388,00 atau 107,81%.

**5.3.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus Rp182.216.756.500,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016. Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus TA2016 adalah sebesar Rp182.216.756.500,00 dibawah anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp227.171.413.800,00 atau 80,21%. Hal ini menyebabkan banyak kegiatan dengan sumber dana DAK yang sudah direalisasikan secara fisik tidak bisa direalisasikan pembayarannya pada Tahun 2016 sehingga menimbulkan utang beban serta utang Belanja Modal.

**5.3.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Rp49.301.984.000,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Dana Penyesuaian Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016 yang merupakan Dana Penyesuaian untuk dana desa.

**5.3.1.2.2.1 Dana Penyesuaian Rp49.301.984.000,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Dana Penyesuaian Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016. Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya untuk TA 2016 adalah sebesar Rp49.301.984.000,00 dibandingkan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp49.301.984.000,00 menunjukkan realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sesuai anggaran yang telah ditetapkan atau 100%.

**5.3.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi Rp102.832.588.478,39**

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Transfer dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016, yang terdiri dari:

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	Rp	102.832.588.478,39
- Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp	0,00
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>Rp</b>	<b>102.832.588.478,39</b>

**5.3.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp102.832.588.478,39**

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih /Kurang	%
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	31.328.558.114,54	31.328.558.114,54	0,00	100,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	34.541.196.072,35	29.231.514.902,72	(5.309.681.169,63)	84,63
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.521.546.614,86	25.521.546.614,86	0,00	100,00
4	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air	155.262.482,40	155.262.482,40	0,00	100,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih /Kurang	%
	Permukaan				
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	18.606.457.395,14	16.595.706.363,87	(2.010.751.031,27)	89,19
	<b>Jumlah</b>	<b>110.153.020.679,29</b>	<b>102.832.588.478,39</b>	<b>(7.320.432.200,90)</b>	<b>93,35</b>

**5.3.1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Rp0,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan pendapatan bagi hasil lainnya bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016.

**5.3.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp139.617.741.555,83**

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016, yang terdiri dari:

- Pendapatan Hibah	Rp	73.937.389.816,20
- Pendapatan Lainnya	Rp	65.680.351.739,63
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>Rp</b>	<b>139.617.741.555,83</b>

**5.3.1.3.1 Pendapatan Hibah Rp73.937.389.816,20**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Hibah bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016. Realisasi penerimaan Pendapatan Hibah untuk TA 2016 sebesar Rp73.937.389.816,20 dibandingkan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp69.568.400.000,00 menunjukkan realisasi Pendapatan Hibah melebihi anggaran sebesar Rp4.368.989.816,20 atau 106,28%.

Realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp73.937.389.816,20 atau 106,28% dari anggarannya merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pendapatan Hibah BOS dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri.

**5.3.1.3.2 Pendapatan Lainnya Rp65.680.351.739,63**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Lainnya bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016, yang terdiri dari:

- Bantuan Keuangan	Rp	65.670.951.039,63
- Pendapatan Lainnya	Rp	9.400.700,00
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>Rp</b>	<b>65.680.351.739,63</b>

**Bantuan Keuangan Rp65.670.951.039,63**

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih /Kurang	%
1	Bantuan Keuangan dari Provinsi	3.310.000.000,00	2.601.136.000,00	(708.864.000,00)	78,58
2	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	63.069.814.039,63	63.069.815.039,63	1.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>66.379.814.039,63</b>	<b>65.670.951.039,63</b>	<b>(708.863.000,00)</b>	<b>98,93</b>

**Pendapatan Lainnya Rp9.400.700,00**

Realisasi Pendapatan Lainnya dalam Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp9.400.700,00 adalah pendapatan yang diperoleh dari pendapatan yang tidak dianggarkan.

**5.3.2 Belanja Daerah** **Rp1.450.826.439.726,43**

Jumlah tersebut realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016, yang terdiri dari:

- Belanja Operasi	Rp	1.246.494.468.642,27
- Belanja Modal	Rp	190.437.979.386,10
- Belanja Tak terduga	Rp	163.681.200,00
- Belanja Transfer	Rp	13.730.310.498,06
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.450.826.439.726,43</b>

Dari realisasi belanja daerah tersebut masih terdapat kegiatan dengan sumber dana DAK yang sudah direalisasikan secara fisik namun belum dibayar sebesar Rp34.225.509.832,00. Sehingga menimbulkan penurunan persentase realisasi belanja daerah.

Rincian anggaran Belanja Daerah yang sudah dikerjakan fisiknya namun belum direalisasikan sebagai berikut :

BELANJA OPERASIONAL		
1	Dinas Kesehatan	Rp97.313.091,00
2	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	Rp113.263.550,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp210.576.641,00</b>
BELANJA MODAL		
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp25.562.863.125,00
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Rp761.972.000,00
3	Dinas Kesehatan	Rp6.182.315.066,00
4	RSUD	Rp890.470.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp204.000.000,00
6	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	Rp413.313.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp34.014.933.191,00</b>

**5.3.2.1 Belanja Operasi** **Rp 1.246.494.468.642,27**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari:

- Belanja Pegawai	Rp	778.530.682.421,10
- Belanja Barang	Rp	300.494.138.056,40
- Belanja Bunga	Rp	2.580.813.297,58
- Belanja Subsidi	Rp	0,00
- Belanja Hibah	Rp	5.882.089.097,00
- Belanja Bantuan Sosial	Rp	901.010.000,00
- Belanja Bantuan Keuangan	Rp	158.105.735.770,19
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>Rp</b>	<b>1.246.494.468.642,27</b>

**5.3.2.1.1 Belanja Pegawai** **Rp778.530.682.421,10**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016, dengan rincian sebagai berikut:



No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih /Kurang	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	481.332.116.821,07	475.623.324.079,00	(5.708.792.742,07)	98,81
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	242.819.502.572,08	234.096.030.500,00	(8.723.472.072,08)	96,41
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.002.000.000,00	4.000.870.900,00	(1.129.100,00)	99,97
4	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	8.011.376.006,56	4.468.819.163,95	(3.542.556.842,61)	55,78
5	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	759.732.075,00	537.314.593,15	(222.417.481,85)	70,72
6	Belanja Uang Lembur	994.819.109,00	959.107.000,00	(35.712.109,00)	96,41
7	Insentif Jasa Pelayanan	28.129.254.800,00	29.533.890.585,00	1.404.635.785,00	104,99
8	Belanja Honorarium PNS	13.092.688.350,00	11.561.061.000,00	(1.531.627.350,00)	88,30
9	Belanja Honorarium Non PNS	17.860.760.500,00	17.331.395.200,00	(529.365.300,00)	97,04
10	Belanja Honorarium Pengelolaan Dana BOS	428.397.600,00	49.719.000,00	(378.678.600,00)	11,61
11	Belanja Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	112.510.000,00	100.320.000,00	(12.190.000,00)	89,17
12	Belanja Honorarium Non Pegawai	64.800.000,00	121.510.000,00	56.710.000,00	187,52
11	Belanja Honorarium Dewan Pengawas BLUD	147.320.400,00	147.320.400,00	0,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>797.755.278.233,71</b>	<b>778.530.682.421,10</b>	<b>(19.224.595.812,61)</b>	<b>97,59</b>

Terjadi pelampauan realisasi belanja dari anggarannya untuk belanja Insentif Jasa Pelayanan pada BLU RSUD sebesar Rp662.971.811,00 berdasarkan SK Direktur RSUD Kabupaten Karangasem TA 2016 serta pada FKTP Puskesmas sebesar Rp741.663.974,00. Hal tersebut disebabkan terjadi pelampauan pendapatan pada puskesmas dan langsung direalisasikan belanja insentif jasa pelayanan menggunakan kas JKN yang dikelola langsung oleh puskesmas.

#### 5.3.2.1.2 Belanja Barang Rp300.494.138.056,40

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih /Kurang	%
<b>A. Belanja Persediaan</b>					
1	Belanja Bahan Pakai Habis	40.484.786.203,19	34.214.598.432,00	(6.270.187.771,19)	84,51
2	Belanja Bahan/Material	35.481.150.884,06	34.615.046.145,12	(866.104.738,94)	97,56
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.554.304.044,29	8.756.338.881,00	(797.965.163,29)	91,65
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.016.487.313,48	8.369.681.371,00	(2.646.805.942,48)	75,97
	<b>Jumlah belanja persediaan</b>	<b>96.536.728.445,02</b>	<b>85.955.664.829,12</b>	<b>(10.581.063.615,90)</b>	<b>89,04</b>
<b>B. Belanja Jasa</b>					
1	Belanja Jasa Kantor	80.949.779.203,00	75.540.143.358,00	(5.409.635.845,00)	93,32
2	Belanja Premi Asuransi	712.534.000,00	572.310.627,00	(140.223.373,00)	80,32
3	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	566.575.000,00	363.530.500,00	(203.044.500,00)	64,16
4	Belanja Cetak dan Penggandaan - Fotocopy	3.776.902.886,00	3.542.055.629,63	(234.847.256,37)	93,76
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.190.550.000,00	965.706.400,00	(224.843.600,00)	81,11

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih /Kurang	%
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.244.263.700,00	1.226.007.516,00	(18.256.184,00)	98,53
7	Belanja Sewa Alat Berat	134.000.000,00	72.950.000,00	(61.050.000,00)	54,44
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.238.323.550,00	2.044.180.700,00	(194.142.850,00)	91,33
9	Belanja Makanan dan Minuman	30.373.189.327,00	26.433.253.752,65	(3.939.935.574,35)	87,03
10	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	838.555.000,00	758.344.500,00	(80.210.500,00)	90,43
11	Belanja Pakaian Kerja	1.266.216.800,00	1.240.614.545,00	(25.602.255,00)	97,98
12	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.034.453.808,00	2.229.976.860,00	195.523.052,00	109,61
13	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.900.580.875,00	5.075.488.142,00	1.174.907.267,00	130,12
14	Belanja Jasa Konsultansi	5.069.879.000,00	4.473.234.250,00	(596.644.750,00)	88,23
15	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	1.524.600.000,00	1.424.600.000,00	(100.000.000,00)	93,44
16	Belanja Barang Dana BOS	149.505.159,00	647.899.088,00	498.393.929,00	433,36
	<b>Jumlah Belanja Jasa</b>	<b>135.969.908.308,00</b>	<b>126.610.295.868,28</b>	<b>(9.359.612.439,72)</b>	<b>93,12</b>
C	Belanja Pemeliharaan				
1	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.577.732.809,00	4.180.179.233,00	(397.553.576,00)	91,32
2	Belanja Pemeliharaan	23.264.853.227,00	22.026.963.295,00	(1.237.889.932,00)	94,68
	<b>Jumlah Belanja Pemeliharaan</b>	<b>27.842.586.036,00</b>	<b>26.207.142.528,00</b>	<b>(1.635.443.508,00)</b>	<b>94,13</b>
D	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>55.955.710.327,07</b>	<b>48.039.764.468,00</b>	<b>(7.915.945.859,07)</b>	<b>85,85</b>
E	<b>Belanja Lainnya</b>				
1	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga – Hadiah	1.365.056.515,00	1.263.603.876,00	(101.452.639,00)	92,57
2	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga – Serahan Pelatihan	894.952.900,00	822.445.535,00	(72.507.365,00)	91,90
3	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.865.709.033,00	5.268.067.345,00	402.358.312,00	108,27
	<b>Jumlah Belanja Lain-Lain</b>	<b>7.125.718.448,00</b>	<b>7.354.116.756,00</b>	<b>228.398.308,00</b>	<b>103,21</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>323.430.651.564,09</b>	<b>294.166.984.449,40</b>	<b>(29.263.667.114,69)</b>	<b>90,95</b>

Realisasi belanja barang menurut APBD 2016 sebesar Rp300.494.138.056,40 sudah termasuk belanja Belanja Hibah Barang/Jasa Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Ketiga sebesar Rp2.149.198.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Ketiga Rp4.177.955.607,00.

### 5.3.2.1.3 Belanja Bunga Rp2.580.813.297,58

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Bunga Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016. Realisasi pembayaran Bunga Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp2.580.813.297,58 dibandingkan anggarannya sebesar Rp3.000.000.000,00 menunjukkan realisasi Pembayaran Bunga dibawah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp419.186.702,42 atau 86,03%. Belanja bunga tersebut digunakan untuk membayar bunga atas Utang Dalam

Negeri Pemerintah Pusat sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada bagian Penjelasan Neraca poin 5.1.2.2.1.

**5.3.2.1.4 Belanja Subsidi Rp0,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Subsidi Pajak Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016.

**5.3.2.1.5 Belanja Hibah Rp8.031.287.097,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016. Belanja Hibah disajikan dengan mengkonversi Belanja Hibah Barang yang dianggarkan dan direalisasikan dalam Belanja Barang disajikan kedalam Belanja Hibah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Konversi ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, rincian realisasi tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih /Kurang	%
1	Realisasi belanja hibah	5.912.100.000,00	5.882.089.097,00	(30.010.903,00)	99,49
2	Belanja Hibah Barang/Jasa Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Ketiga	2.894.665.000,00	2.149.198.000,00	(745.467.000,00)	74,25
<b>Jumlah</b>		<b>8.806.765.000,00</b>	<b>8.031.287.097,00</b>	<b>(775.447.903,00)</b>	<b>91,19</b>

**5.3.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial Rp5.078.965.607,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih /Kurang	%
1	Realisasi belanja bantuan sosial	955.000.000,00	901.010.000,00	(53.990.000,00)	94,35
2	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Ketiga	4.506.902.714,00	4.177.955.607,00	(328.947.107,00)	92,70
<b>Jumlah</b>		<b>5.461.902.714,00</b>	<b>5.078.965.607,00</b>	<b>(382.937.107,00)</b>	<b>92,99</b>

**5.3.2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Rp158.105.735.770,19**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih /Kurang	%
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi	21.327.154.452,00	21.327.154.452,00	0,00	100,00
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	119.610.639.861,20	119.610.639.836,19	(25,01)	100,00
3	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	811.765.832,00	797.941.482,00	(13.824.350,00)	98,30
4	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Desa Pakraman, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian	13.787.400.000,00	13.749.400.000,00	(38.000.000,00)	99,72
5	Belanja Bantuan Keuangan untuk Desa Pakraman Kelurahan Karangasem	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	100,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih /Kurang	%
6	Belanja Bantuan Keuangan untuk Banjar Adat Kelurahan Karangasem	455.000.000,00	429.000.000,00	(26.000.000,00)	94,29
7	Belanja Bantuan Keuangan untuk Subak dan Subak Abian Kelurahan Karangasem	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00
8	Belanja Bantuan Keuangan untuk Desa Pakraman Kelurahan Padangkerta	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	100,00
9	Belanja Bantuan Keuangan untuk Banjar Adat Kelurahan Padangkerta	403.000.000,00	390.000.000,00	(13.000.000,00)	96,77
10	Belanja Bantuan Keuangan untuk Subak dan Subak Abian Kelurahan Padangkerta	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00
11	Belanja Bantuan Keuangan untuk Desa Pakraman Kelurahan Subagan	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00
12	Belanja Bantuan Keuangan untuk Banjar Adat Kelurahan Subagan	377.000.000,00	364.000.000,00	(13.000.000,00)	96,55
13	Belanja Bantuan Keuangan untuk Subak dan Subak Abian Kelurahan Subagan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00
14	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>158.209.560.145,20</b>	<b>158.105.735.770,19</b>	<b>(103.824.375,01)</b>	<b>99,93</b>

### 5.3.2.2 Belanja Modal Rp190.437.979.386,10

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih /Kurang	%
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	44.274.003.839,00	36.851.218.597,10	(7.422.785.241,90)	83,23
3	Belanja Gedung & Bangunan	67.682.270.238,00	55.713.764.319,00	(11.968.505.919,00)	82,32
4	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	130.251.810.370,00	83.450.588.309,00	(46.801.222.061,00)	64,07
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	15.772.333.273,00	14.422.408.161,00	(1.349.925.112,00)	91,44
6	Aset Lainnya				
<b>Jumlah</b>		<b>257.980.417.720,00</b>	<b>190.437.979.386,10</b>	<b>(67.542.438.333,90)</b>	<b>73,82</b>

Rincian belanja modal untuk masing-masing SKPD dapat dilihat pada *lampiran 18*.

### 5.3.2.3 Belanja Tak Terduga Rp163.681.200,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016. Realisasi Belanja Tak Terduga untuk TA 2016 sebesar Rp163.681.200,00 dibandingkan anggarannya sebesar Rp1.000.000.000,00 menunjukkan realisasi Belanja Tak Terduga pada Tahun 2016 dibawah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp836.318.800,00 atau 16,37%.

**5.3.2.4 Transfer Rp13.730.310.498,06**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016 yang merupakan transfer/bagi hasil pendapatan

**5.3.2.4.1 Bagi Hasil Pendapatan Rp13.730.310.498,06**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Transfer/Bagi Hasil Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih /Kurang	%
1	Bagi Hasil Pajak Daerah	12.151.726.735,06	12.151.726.735,06	0,00	100,00
2	Bagi Hasil Retribusi	1.578.583.763,00	1.578.583.763,00	0,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.730.310.498,06</b>	<b>13.730.310.498,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

**5.3.3 Pembiayaan Rp114.446.431.273,18**

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus dan menutup defisit yang timbul dari selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kegiatan Pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

**5.3.3.1 Penerimaan Pembiayaan Rp142.694.804.190,82**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016. Realisasi Penerimaan Pembiayaan untuk TA 2016 sebesar Rp142.694.804.190,82 dibandingkan anggarannya sebesar Rp142.860.983.611,81 menunjukkan realisasi Penerimaan Pembiayaan dibawah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp166.179.420,99 atau 99,88%. Sumber penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp142.685.297.190,82 dan Penerimaan Piutang Daerah dari Dana Bergulir sebesar Rp9.507.000,00. Penerimaan pembiayaan tersebut untuk menutup kebutuhan belanja.

**5.3.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Rp28.248.372.917,64**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp28.248.372.917,64 dibandingkan anggarannya sebesar Rp28.500.000.000,00 menunjukkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan dibawah anggaran yang ditetapkan Rp251.627.082,36 atau 99,12% dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyertaan Modal sejumlah Rp4.500.000.000,00 dilakukan untuk penambahan modal di PDAM Kabupaten Karangasem dalam bentuk kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan; dan
2. Pembayaran Pokok Hutang sebesar Rp23.748.372.917,64 merupakan pembayaran atas pinjaman pemerintah pusat No. SLA-1134/DP3/2000, tanggal 5 April 2000 untuk membiayai Terminal Karang Sokong dan Pinjaman Pusat Investasi Pemerintah untuk Pembangunan Pasar Umum Amlapura Timur, dan Pembangunan RSUD Tipe C.

**5.3.4 Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran Rp125.644.340.402,55**

Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Tahun Anggaran 2016 memiliki nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp125.644.340.402,55 yaitu penjumlahan antara nilai Surplus/(Defisit) Anggaran sebesar Rp11.197.909.129,37 dengan nilai pembiayaan netto sebesar Rp114.446.431.273,18. SiLPA tersebut terdiri dari:

- Kas di Kas Daerah	Rp	118.967.157.856,36
- Kas di Bendahara BLUD	Rp	3.131.930.393,54
- Kas di Bendahara FKTP Puskesmas	Rp	1.536.936.233,38
- Kas di Bendahara BOS	Rp	2.008.315.919,27
<b>Jumlah SiLPA</b>	<b>Rp</b>	<b>125.644.340.402,55</b>

SiLPA TA 2016 tidak termasuk Kas di Bendahara FKTP Puskesmas dikarenakan sisa Kas di Bendahara FKTP pada Puskesmas Abang I merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga berupa Kewajiban kepada rekanan yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca sebesar Rp5.000.000,00 serta kesalahan penginputan pendapatan oleh pihak bank pada rekening giro kas daerah sebesar Rp1.212.500,00.

Hal ini telah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada bagian neraca poin 5.1.1.1.5.

**5.4 Penjelasan Pos Laporan Operasional**

**5.4.1 Kegiatan Operasional**

Jumlah tersebut merupakan Surplus yang diperoleh dari Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016, yang perhitungannya sebagai berikut:

- Pendapatan	Rp	1.475.538.416.472,56
- Beban	Rp	(1.383.793.261.441,20)
<b>Surplus dari Kegiatan Operasional</b>	<b>Rp</b>	<b>91.745.155.031,36</b>

**5.4.1.1 Pendapatan Rp1.475.538.416.472,56**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016, yang terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah	Rp	250.618.032.877,33
- Pendapatan Transfer	Rp	1.083.720.361.256,20
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp	141.200.022.339,03
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp</b>	<b>1.475.538.416.472,56</b>

**5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah Rp250.618.032.877,33**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016, yang terdiri dari:

- Pendapatan Pajak Daerah	Rp	129.161.868.598,32
- Pendapatan Retribusi Daerah	Rp	16.629.845.716,86
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	13.592.314.005,36
- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp	91.234.004.556,79
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>250.618.032.877,33</b>

**5.4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah****Rp129.161.868.598,32**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Pajak Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam Laporan Operasional (LO) ini lebih besar dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2016 sebesar Rp11.379.680.513,98. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan Pendapatan Pajak Daerah, yang dijelaskan sebagai berikut:

- Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Pajak Daerah LO dari Pendapatan Pajak Daerah LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengakuan pendapatan LO atas piutang pajak yang pemungutannya berdasarkan <i>self assesment</i> Tahun 2016 berdasarkan inventarisasi piutang.	Rp17.443.000.606,74
2.	Pengakuan pendapatan LO atas ketetapan pajak yang pemungutannya berdasarkan <i>official assesment</i> Tahun 2016 yang belum dibayar.	Rp3.096.595.538,00
3.	Pengakuan pendapatan LO atas penerimaan pajak TA 2016 yang belum disetor oleh bendahara penerimaan Dispenda	Rp46.933,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp20.539.643.077,74</b>

- Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Pajak Daerah LO dari Pendapatan Pajak Daerah LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengurangan Pendapatan Pajak Daerah LO atas piutang pajak yang pemungutannya berdasarkan <i>self assessment</i> Tahun 2015 (hotel, restoran, hiburan dan MBLB) pada Dinas Pendapatan	Rp9.159.743.763,76
2.	Pengurangan Pendapatan Pajak Daerah LO atas penurunan nilai piutang pajak reklame yang pemungutannya berdasarkan <i>official assesment</i> pada Dinas Pendapatan Tahun 2015	Rp218.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp9.159.962.563,76</b>

**5.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah****Rp16.629.845.716,86**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016. Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO ini lebih kecil dari Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2016 sebesar Rp644.870.497,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah, yang dijelaskan sebagai berikut:

- Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Retribusi Daerah LO dari Pendapatan Retribusi Daerah LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengakuan pendapatan LO atas piutang retribusi jasa umum tanggal 29 s.d. 31 Desember 2016, JKBM Bln Oktober 2016 yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan ke Kas Daerah.	Rp161.586.000,00
2.	Pengakuan pendapatan LO atas piutang retribusi menara telekomunikasi yang belum bayar pada Diskominfo Tahun 2016.	Rp296.652.726,00
3.	Pengakuan pendapatan LO atas pendapatan retribusi pelayanan kesehatan TA 2016	Rp537.330.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp995.568.726,00</b>

- Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah LO dari Pendapatan Retribusi Daerah LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengurangan pendapatan retribusi LO atas pendapatan retribusi yang disetor Tahun 2016 yang merupakan pungutan retribusi Tahun 2015 yang belum disetor oleh bendahara Diparda	Rp26.187.400,00
2.	Pengurangan pendapatan retribusi LO atas pendapatan retribusi yang disetor Tahun 2016 yang merupakan piutang retribusi Tahun 2015 pada Dikes	Rp39.100.829,00
3.	Pengurangan pendapatan retribusi LO atas piutang retribusi Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2015	Rp261.375.000,00
4.	Pengurangan pendapatan retribusi LO atas nilai piutang JKBM atas klaim yang sudah diverifikasi	Rp24.035.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp350.698.229,00</b>

#### 5.4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Rp13.592.314.005,36 Dipisahkan

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016. Jumlah tersebut sama dengan jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA TA 2016. Pendapatan tersebut merupakan deviden dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, PDAM Kabupaten Karangasem dan PT Jamkrida Bali Mandara.

#### 5.4.1.1.1.4 Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp91.234.004.556,79

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016. Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang Sah dalam LO ini lebih besar dari Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2016 sebesar Rp5.949.468.636,77. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang dijelaskan sebagai berikut:

- Pengakuan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang mempengaruhi penambahan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LO dari Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengakuan pendapatan Lain lain PAD yang Sah -LO atas pendapatan BLUD yang belum disetor oleh bendahara penerimaan pada RSUD Tahun 2016.	Rp25.452.230,00
2.	Pengakuan pendapatan Lain lain PAD yang Sah -LO atas piutang denda pajak pada Dispenda Tahun 2016.	Rp1.469.245.792,65
3.	Pengakuan pendapatan Lain lain PAD yang Sah -LO atas piutang BLUD pada RSUD Tahun 2016.	Rp11.892.880.106,53
4.	Pengakuan pendapatan Lain lain PAD yang Sah -LO atas pendapatan yang sudah diterima sebelum Tahun 2016 dengan masa perjanjian sampai Tahun 2016 pada Perlengkapan, Diparda, Diperindag, dan Dispenda.	Rp40.907.641,67
5.	Pengakuan atas pendapatan lain-lain PAD yang sah-LO atas pendapatan jasa giro dana JKBM	Rp656.719,76
<b>Jumlah</b>		<b>Rp13.429.142.490,61</b>



- Pengakuan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang mempengaruhi pengurangan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO dari Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengurangan pendapatan Lain lain PAD yang Sah -LO atas kas pada bendahara penerimaan RSUD Tahun 2015 yang disetor Tahun 2016.	Rp44.030.630,00
2.	Pengurangan pendapatan Lain lain PAD yang Sah -LO atas kas pada bendahara FKTP Diskes Tahun 2015 berupa Jagir yang disetor Tahun 2016.	Rp19.308.785,46
3.	Pengurangan pendapatan Lain lain PAD yang Sah -LO atas kas pada bendahara FKTP Diskes Tahun 2015 berupa denda keterlambatan yang disetor Tahun 2016.	Rp2.748.240,00
4.	Pengurangan pendapatan Lain lain PAD yang Sah -LO atas penyeteroran atas tindak lanjut TPTGR yang merupakan temuan sebelum Tahun 2016.	Rp3.956.400,00
5.	Pengurangan pendapatan Lain lain PAD yang Sah -LO atas piutang BLU Tahun 2015 yang disetor Tahun 2016.	Rp7.175.866.526,81
6.	Pengurangan pendapatan Lain lain PAD yang Sah -LO atas pendapatan sewayang diterima tahun 2016 namun merupakan pengakuan pendapatan LO setelah Tahun 2016 sesuai perjanjian.	Rp12.005.208,33
7.	Pengurangan pendapatan Lain lain PAD yang Sah -LO atas pelunasan piutang lainnya atas denda pajak pada Dispenda Tahun 2016	Rp221.758.063,23
<b>Jumlah</b>		<b>Rp7.479.673.853,83</b>

**5.4.1.2 Pendapatan Transfer Rp1.083.720.361.256,20**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Transfer oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016 yang terdiri dari:

- Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	Rp	937.628.021.592,00
- Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	Rp	49.301.984.000,00
- Transfer Pemerintah Provinsi	Rp	96.790.355.664,20
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp</b>	<b>1.083.720.361.256,20</b>

**5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Rp937.628.021.592,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016 yang terdiri dari:

- Dana Bagi Hasil Pajak	Rp	21.458.384.197,00
- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	Rp	989.021.895,00
- Dana Alokasi Umum	Rp	732.963.859.000,00
- Dana Alokasi Khusus	Rp	182.216.756.500,00
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>Rp</b>	<b>937.628.021.592,00</b>

**5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak Rp21.458.384.197,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016. Jumlah tersebut sama dengan nilai penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dalam LRA TA 2016.

**5.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Rp989.021.895,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016. Jumlah tersebut sama dengan nilai penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dalam LRA TA 2016.

**5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum Rp732.963.859.000,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Dana Alokasi Umum oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016. Jumlah tersebut sama dengan nilai penerimaan Dana Alokasi Umum dalam LRA TA 2016.

**5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus Rp182.216.756.500,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Dana Alokasi Khusus oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016. Jumlah tersebut sama dengan nilai penerimaan Dana Alokasi Khusus dalam LRA TA 2016.

**5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Rp49.301.984.000,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016 yang merupakan pengakuan penerimaan Dana Penyesuaian untuk dana desa.

**5.4.1.2.2.1 Dana Penyesuaian Rp49.301.984.000,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Dana Penyesuaian oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016. Jumlah tersebut sama dengan nilai penerimaan Dana Penyesuaian dalam LRA TA 2016.

**5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi Rp96.790.355.664,20**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016 yang terdiri dari:

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	Rp	96.790.355.664,20
- Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp	0,00
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>Rp</b>	<b>96.790.355.664,20</b>

**5.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp96.790.355.664,20**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan bagi Hasil Pajak dari Provinsi oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016. Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dalam LO ini lebih rendah dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dalam LRATA 2016 sebesar Rp6.042.232.814,19. Hal yang mempengaruhi perbedaan pengakuan pendapatan tersebut seperti pada uraian dibawah ini:

- Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LRA yaitu Pengakuan pendapatan LO atas piutang lainnya atas pendapatan transfer DBH dari Provinsi Bali Tahun 2016 sebesar Rp18.054.256.161,60.

- Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LRA adalah piutang lainnya atas pendapatan transfer DBH dari Provinsi Bali tahun 2015 yang ditransfer Tahun 2016 sebesar Rp24.096.488.975,79.

**5.4.1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Rp0,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016. Jumlah tersebut sama dengan nilai Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dalam LRA TA 2016

**5.4.1.3 Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp141.200.022.339,03**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah oleh pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016, yang terdiri dari:

- Pendapatan Hibah	Rp	75.519.670.599,40
- Pendapatan Lainnya	Rp	65.680.351.739,63
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>Rp</b>	<b>141.200.022.339,03</b>

**5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah Rp75.519.670.599,40**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Hibah oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016. Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO ini lebih tinggi dari nilai Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2016 sebesar Rp1.582.280.783,20 dikarenakan adanya pengakuan pendapatan hibah yang menambah nilai Pendapatan Hibah dalam LO ini dari nilai Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2016 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Penerimaan Hibah Alat Kontrasepsi dari BKKBN Perwakilan Bali	247.681.600,00
2	Pendapatan hibah aset tahun 2016	1.334.599.183,20
<b>Jumlah</b>		<b>1.582.280.783,20</b>

**5.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya Rp65.680.351.739,63**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan pendapatan Lainnya oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016. Jumlah tersebut sama dengan nilai dari Pendapatan Lainnya dalam LRA TA 2016. Rincian pendapatan lainnya dapat dilihat dalam LRA TA 2016.

**5.4.1.2 Beban Rp1.383.793.261.441,20**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban untuk Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016 terdiri dari:

- Beban Pegawai	Rp	780.214.447.215,41
- Beban Persediaan	Rp	86.521.387.685,60
- Beban Jasa	Rp	133.689.968.669,71
- Beban Pemeliharaan	Rp	25.951.746.028,00
- Beban Perjalanan Dinas	Rp	48.043.259.468,00
- Beban Bunga	Rp	2.580.813.297,58
- Beban Subsidi	Rp	0,00
- Beban Hibah	Rp	8.026.367.097,00
- Beban Bantuan Sosial	Rp	5.078.965.607,00

- Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	112.128.869.125,96
- Beban Penyisihan Piutang	Rp	2.367.274.222,69
- Beban Penyisihan Investasi Non Permanen	Rp	0,00
- Beban Transfer	Rp	171.836.046.268,25
- Beban Lain-Lain	Rp	7.354.116.756,00
<b>Jumlah Beban</b>	<b>Rp</b>	<b>1.383.793.261.441,20</b>

**5.4.1.2.1 Beban Pegawai Rp780.214.447.215,41**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Pegawai oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016. Pengakuan beban pegawai dalam LO ini lebih besar dari Belanja Pegawai dalam LRA TA 2016 sebesar Rp1.683.764.794,31. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan Belanja Pegawai, yang dijelaskan sebagai berikut:

- Pengakuan Beban Pegawai yang mempengaruhi penambahan Beban Pegawai-LO yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengakuan beban pegawai-LO atas utang jangka pendek RSUD dan beberapa dinas penghasil Tahun 2016	Rp10.003.097.758,34
2.	Pengakuan beban pegawai- LO atas beban pegawai yang menjadi utang jangka pendek lainnya berdasarkan data dari Dinas Pendidikan atas tamsil guru satu atap dan tambahan beban kerja	Rp900.000,00
3.	Pengakuan beban pegawai - LO atas koreksi Utang jasa pelayanan JKN pada 12 Puskesmas Tahun 2016 yang belum dibayarkan	Rp633.425.000,00
4.	Pengakuan beban pegawai - LO atas Koreksi nilai utang beban pegawai atas insentif pemungutan retribusi pada BLH	Rp250.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp10.637.672.758,34</b>

- Pengakuan Beban Pegawai yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai-LO dari Belanja Pegawai LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengakuan beban pegawai- LO atas utang jangka pendek RSUD dan dinas penghasil tahun 2015.	Rp5.430.773.070,22
2.	Pengakuan beban pegawai- LO atas utang jangka pendek pada beberapa Dinas penghasil Tahun 2015.	Rp2.687.454.880,81
3.	Pengakuan beban pegawai - LO atas utang Taspen atas JKM dan JKK Tahun 2015	Rp835.680.013,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp8.953.907.964,03</b>

**5.4.1.2.2 Beban Persediaan Rp86.521.387.685,60**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Persediaan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016. Pengakuan Beban Persediaan dalam LO ini lebih besar dari Belanja Persediaan dalam LRA sebesar Rp565.722.856,48. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan Beban Persediaan yang dijelaskan sebagai berikut:

- Pengakuan Beban Persediaan yang mempengaruhi penambahan Beban Persediaan – LO dari Belanja Barang LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengakuan beban persediaan- LO atas persediaan pada Tahun 2015.	Rp9.435.886.909,05
2.	Pengakuan beban persediaan – LO atas utang jangka pendek pada Tahun 2016.	Rp2.040.454.432,00
3.	Pengakuan beban persediaan – LO atas penerimaan hibah Alkon dari BKKBN pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	Rp247.681.600,00
4.	Pengakuan beban persediaan – LO atas koreksi nilai persediaan	Rp170.602.914,42
<b>Jumlah</b>		<b>Rp11.894.625.855,47</b>

- Pengakuan Beban Persediaan yang mempengaruhi pengurangan Beban Persediaan –LO dari Belanja Barang LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengurangan beban persediaan- LO atas belanja bahan pakai habis, material dan bahan,cetak, dll Tahun 2016 yang masih menjadi persediaan.	Rp11.038.239.793,23
2.	Pengurangan beban persediaan – LO atas pembayaran utang jangka pendek Tahun 2015.	Rp147.309.068,00
3.	Pengurangan beban persediaan karena kapitalisasi ke aset tetap	Rp85.797.500,00
4.	Pengurangan beban persediaan karena koreksi nilai persediaan	Rp57.556.637,76
<b>Jumlah</b>		<b>Rp11.328.902.998,99</b>

#### 5.4.1.2.3

#### Beban Jasa

**Rp133.689.968.669,71**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Jasa oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016. Pengakuan Beban Jasa dalam LO ini lebih kecil dari Belanja Jasa dalam LRA sebesar Rp7.079.672.801,43. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan Beban Jasa yang dijelaskan sebagai berikut:

- Pengakuan Beban Jasa yang mempengaruhi penambahan Beban Jasa –LO dari Belanja Jasa LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengakuan beban jasa- LO atas belanja sewa dengan perjanjian lebih dari satu tahun yang Tahun 2016 masih menjadi beban.	Rp24.550.000,00
2.	Pengakuan beban jasa – LO atas utang jangka pendek pada beberapa SKPD Tahun 2016.	Rp575.639.300,00
3.	Pengakuan beban jasa – LO atas Koreksi kewajiban sharing JKBM Kabupaten Karangasem tahun 2016	Rp6.511.828.501,43
<b>Jumlah</b>		<b>Rp7.112.017.801,43</b>

- Pengakuan Beban Jasa yang mempengaruhi pengurangan Beban Jasa–LO dari Belanja Jasa LRA yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengurangan beban jasa- LO atas belanja sewa Tahun 2016 yang masih mempunyai masa manfaat tahun berikutnya pada Dispenda.	Rp4.000.000,00
2.	Pengurangan beban jasa – LO atas pembayaran utang jangka pendek BLUD RSUD Tahun 2015.	Rp4.380.000,00
3.	Pengurangan beban jasa – LO karena kapitalisasi ke aset tetap	Rp23.965.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp32.345.000,00</b>

- 5.4.1.2.4 Beban Pemeliharaan Rp25.951.746.028,00**  
Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Pemeliharaan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016. Jumlah pengakuan Beban Pemeliharaan dalam LO ini lebih rendah dari Belanja Pemeliharaan dalam LRA TA 2016 sebesar (Rp255.396.500,00). Hal tersebut dikarenakan terdapat Pemeliharaan di RSUD untuk TA 2016 yang masih sebagai utang jangka pendek Tahun 2016. Serta pengurangan beban pemeliharaan – LO karena kapitalisasi ke aset tetap sebesar Rp261.034.000,00.
- 5.4.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas Rp48.043.259.468,00**  
Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Perjalanan Dinas oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016. Jumlah pengakuan Beban Perjalanan Dinas dalam LO ini lebih besar dari Belanja Perjalanan Dinas dalam LRA TA 2016 sebesar Rp3.495.000,00. Hal tersebut dikarenakan terdapat perjalanan dinas yang masih merupakan utang pada Dinas Kesehatan Tahun 2016.
- 5.4.1.2.6 Beban Bunga Rp2.580.813.297,58**  
Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Bunga oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016. Jumlah pengakuan Beban Bunga dalam LO ini sama dengan belanja bunga LRA Tahun 2016. Rincian dapat dilihat pada rincian belanja bunga LRA.
- 5.4.1.2.7 Beban Subsidi Rp0,00**  
Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Subsidi oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016.
- 5.4.1.2.8 Beban Hibah Rp8.026.367.097,00**  
Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Hibah oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016. Jumlah tersebut lebih kecil dengan nilai belanja Hibah pada LRA TA 2016 sebesar Rp4.920.000,00 karena adanya koreksi atas nilai persediaan berdasarkan belanja hibah berupa barang pada Dinas Kesehatan yang belum diserahkan kepada masyarakat s.d. 31 Desember 2016. Rincian Beban Hibah dapat dilihat pada rincian Belanja Hibah LRA.
- 5.4.1.2.9 Beban Bantuan Sosial Rp5.078.965.607,00**  
Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Bantuan Sosial oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016. Jumlah tersebut sama dengan nilai belanja Bantuan Sosial pada LRA TA 2016. Rincian Beban Bantuan Sosial dapat dilihat pada rincian Belanja Bantuan Sosial LRA.
- 5.4.1.2.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp112.128.869.125,96**  
Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016.

**5.4.1.2.11 Beban Penyisihan Piutang** **Rp2.367.274.222,69**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Penyisihan Piutang oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengakuan beban penyisihan atas piutang pajak	2.192.018.895,32
2.	Pengakuan beban penyisihan atas piutang retribusi	5.094.718,97
3.	Pengakuan beban penyisihan piutang atas Piutang Lainnya BLUD	45.411.835,46
4.	Pengakuan beban penyisihan piutang atas Piutang lainnya denda pajak	124.748.772,94
<b>Jumlah</b>		<b>2.367.274.222,69</b>

**5.4.1.2.12 Beban Penyisihan Investasi Non Permanen** **Rp0,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Penyisihan Investasi Non Permanen oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016

**5.4.1.2.13 Beban Transfer** **Rp171.836.046.268,25**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Transfer oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016 yang terdiri dari:

- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp	12.151.726.735,06
- Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp	1.578.583.763,00
- Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp	158.105.735.770,19
<b>Jumlah Beban Transfer</b>	<b>Rp</b>	<b>171.836.046.268,25</b>

**Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah** **Rp12.151.726.735,06**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016. Jumlah tersebut sama dengan nilai belanja transfer bagi hasil pajak LRA Tahun 2016.

**Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah** **Rp1.578.583.763,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016. Jumlah tersebut sama dengan nilai belanja transfer bagi hasil pendapatan lainnya LRA Tahun 2016.

**Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Provinsi/  
Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa** **Rp158.105.735.770,19**

Jumlah tersebut merupakan Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada provinsi, desa dan partai politik oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016. Jumlah tersebut sama dengan nilai belanja transfer bagi hasil pendapatan lainnya LRA Tahun 2016.

**5.4.1.2.14 Beban Lain-Lain** **Rp7.354.116.756,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Lain-Lain oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016. Pengakuan Beban Lain-Lain tersebut berasal dari pengakuan beban atas belanja sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Pengakuan Beban Lain-Lain dari Belanja Hadiah/Penghargaan dan serahan pelatihan	Rp2.086.049.411,00
2	Pengakuan Beban Lain-Lain dari Uang untuk Diberikan kepada masyarakat/Pihak Ketiga	Rp5.268.067.345,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp7.354.116.756,00</b>

**5.4.2 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (Rp345.717.818,00)**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional atau tidak rutin yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016 yang terdiri dari:

- Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp	0,00
- Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp	0,00
- Defisit Penjualan Aset Non Lancar	Rp	0,00
- Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp	0,00
- Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Rp	<u>(Rp345.717.818,00)</u>
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>(Rp345.717.818,00)</b>

**5.4.2.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar Rp0,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus/Keuntungan atas Penjualan Aset Non Lancar yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016.

**5.4.2.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Rp0,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus/Keuntungan atas Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016.

**5.4.2.3 Defisit Penjualan Aset Non Lancar Rp0,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Defisit/Kerugian atas Penjualan Aset Non Lancar yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016.

**5.4.2.4 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Rp0,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Defisit/Kerugian atas Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016.

**5.4.2.5 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (Rp345.717.818,00)**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016. Pengakuan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari pengakuan beban penghapusan aset tetap yang masih memiliki nilai sisa manfaat dan umur penggunaannya belum berakhir namun telah dihapuskan dari daftar aset tetap sebesar Rp345.717.818,00.

**5.4.3 Pos Luar Biasa (Rp163.681.200,00)**

Jumlah tersebut merupakan nilai Pos Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Karangasem yang terjadi selama TA 2016. Pos Luar Biasa tersebut terjadi karena kejadian atau transaksi yang



bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Kabupaten Karangasem.

**5.4.3.1 Pendapatan Luar Biasa Rp0,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Luar Biasa oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016.

**5.4.3.2 Beban Luar Biasa Rp163.681.200,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Luar Biasa oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA2016. Jumlah tersebut sama dengan nilai belanja Tidak Terduga LRA Tahun 2016

**5.4.4 Surplus/(Defisit) – LO Rp91.235.756.013,36**

Jumlah tersebut merupakan nilai Surplus atas Kegiatan Operasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016, yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Kegiatan Operasional:

Pendapatan	Rp	1.475.538.416.472,56
Beban	Rp	<u>(1.383.793.261.441,20)</u>
Surplus Kegiatan Operasional	Rp	91.745.155.031,36
Kegiatan Non Operasional	Rp	<u>(345.717.818,00)</u>
Surplus Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	91.399.437.213,36
Pos Luar Biasa	Rp	<u>(163.681.200,00)</u>
<b>Surplus Laporan Operasional</b>	<b>Rp</b>	<b><u><u>91.235.756.013,36</u></u></b>

**5.5 Penjelasan atas Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama tahun anggaran 2016. Tujuan pelaporan arus kas untuk menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama tahun anggaran 2016 dan saldo kas pada tanggal 31 Desember 2016.

**5.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi pemerintah. Arus kas dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016 dan TA 2015 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut:

		Tahun 2016	Tahun 2015
<b>5.5.1.1</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
	Pendapatan Pajak Daerah	117.782.188.084,34	139.626.191.925,60
	Pendapatan Retribusi Daerah	15.984.975.219,86	14.255.155.130,03
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.592.314.005,36	13.535.055.710,61
	Lain-Lain PAD yang Sah	85.095.224.860,02	9.512.416.792,59
	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak	21.458.384.197,00	16.048.886.800,00
	Pendapatan Dana Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	989.021.895,00	1.258.613.033,00
	Pendapatan Dana Alokasi Umum	732.963.859.000,00	633.241.287.000,00
	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	182.216.756.500,00	55.877.344.000,00
	Pendapatan Dana Penyesuaian	49.301.984.000,00	178.178.534.000,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	102.832.588.478,39	105.387.045.055,81
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
	Pendapatan Hibah	73.937.389.816,20	11.932.554.440,00
	Pendapatan Lainnya	65.680.351.739,63	55.265.408.202,59
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>1.461.835.037.795,80</b>	<b>1.234.118.492.090,23</b>

		Tahun 2016	Tahun 2015
<b>5.5.1.2</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
	Belanja Pegawai	778.530.682.421,10	696.387.432.961,86
	Belanja Barang dan Jasa	300.494.138.056,40	164.271.654.044,00
	Belanja Bunga	2.580.813.297,58	4.458.177.336,66
	Subsidi	0,00	0,00
	Hibah	5.882.089.097,00	47.230.976.805,00
	Bantuan Sosial	901.010.000,00	1.650.312.900,00
	Belanja Bantuan Keuangan	158.105.735.770,19	123.735.350.236,75
	Belanja Tak Terduga	163.681.200,00	584.263.646,00
	Bagi Hasil Pajak	12.151.726.735,06	16.286.253.201,07
	Bagi Hasil Retribusi	1.578.583.763,00	0,00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>1.260.388.460.340,33</b>	<b>1.054.604.421.131,34</b>

<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>201.446.577.455,47</b>	<b>179.514.070.958,89</b>
---	---------------------------	---------------------------

Selama TA 2016, arus kas masuk bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem sebesar Rp1.461.835.037.795,80 dan arus kas keluar sebesar Rp1.260.388.460.340,33, sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp201.446.577.455,47 yang digunakan untuk membiayai aktivitas lainnya.

## 5.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Aktivitas investasi/investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas investasi/investasi aset non keuangan Pemerintah Kabupaten

Karangasem selama TA 2016 dan TA 2015 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut:

5.5.2.1	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2015</b>
	Lain-Lain PAD yang Sah - Penjualan Bahan Bekas Bangunan	54.977.300,00	67.274.150,00
	Lain-Lain PAD yang Sah - Penjualan Aset Tetap Lainnya Hewan Ternak	131.682.760,00	0,00
	Lain-Lain PAD yang Sah - Penjualan Sampah Plastik	2.651.000,00	0,00
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>189.311.060,00</b>	<b>67.274.150,00</b>

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi/investasi aset non keuangan tersebut berasal dari penjualan sisa bahan bangunan yang asetnya telah dihapuskan dari daftar aset tetap, penjualan aset tetap lainnya hewan ternak dana bergulir, dan penjualan sampah plastik.

5.5.2.2	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2015</b>
	Belanja Tanah	0,00	0,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	36.851.218.597,10	39.891.870.497,46
	Belanja Gedung dan Bangunan	55.713.764.319,00	50.494.807.502,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.450.588.309,00	66.017.518.430,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	14.422.408.161,00	1.139.592.700,00
	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.500.000.000,00	4.978.010.016,49
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>194.937.979.386,10</b>	<b>162.521.799.145,95</b>

<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan</b>	<b>(194.748.668.326,10)</b>	<b>(162.454.524.995,95)</b>
---	-----------------------------	-----------------------------

Selama TA 2016, arus kas masuk bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem sebesar Rp189.311.060,00 dan arus kas keluar sebesar Rp194.937.979.386,10 sehingga terdapat kekurangan kas untuk membiayai aktivitas investasi/investasi aset non keuangan sebesar Rp194.748.668.326,10. Kekurangan tersebut dibiayai dari aktivitas lainnya.

### 5.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN

Arus kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016 dan 2015 yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016 dan TA 2015 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut:

	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2015</b>
<b>5.5.3.1 Arus Masuk Kas</b>		
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	9.507.000,00	11.800.000,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>9.507.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>

	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2015</b>
<b>5.5.3.2 Arus Keluar Kas</b>		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah	23.748.372.917,64	23.748.372.916,84
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>23.748.372.917,64</b>	<b>23.748.372.916,84</b>

---

**Arus Kas Bersih dari Aktivitas (23.738.865.917,64) (23.736.572.916,84)  
Pendanaan/Pembiayaan**

---

Selama TA 2016, arus kas masuk bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem sebesar Rp9.507.000,00 dan arus kas keluar sebesar Rp23.748.372.917,64 sehingga terdapat kekurangan kas untuk membiayai aktivitas pendanaan/pembiayaan sebesar Rp23.738.865.917,64. Kekurangan tersebut dibiayai dari aktivitas lainnya.

#### **5.5.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN**

Arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2016 dan 2015. Arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016 dan TA 2015 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut:

	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2015</b>
<b>5.5.4.1 Arus Masuk Kas</b>		
Iuran Wajib Pegawai	33.667.867.613,00	33.577.351.686,00
Pajak Penghasilan Ps.21	31.144.322.752,07	33.326.360.412,47
Pajak Penghasilan Ps.22	548.319.045,00	670.130.939,00
Pajak Penghasilan Ps.23/Ps.26	306.427.890,00	302.457.282,00
Pajak Penghasilan Ps.4 Ayat 2	3.362.834.685,00	2.280.816.899,00
PPn Pusat	19.533.102.345,00	16.140.432.482,00
Tab. Uang Muka Perum Pegawai	696.805.091,00	698.068.000,00
ASKES	10.110.522.145,00	10.082.414.688,00
Beras (Bulog)	0,00	101.000,00
Sisa dana BOS tahun 2011	132.240.000,00	0,00
Utang JKK 2015	308.710.934,00	0,00
Utang JKM 2015	385.883.910,00	0,00

	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2015</b>
Utang kepada rekanan pada FKTP	5.000.000,00	
Kesalahan penginputan pendapatan oleh pihak Bank pada rekening giro kasda	1.212.500,00	
Silpa (penerimaan sisa UUDP bendahara pengeluaran tahun sebelumnya)	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>100.203.248.910,07</b>	<b>97.078.133.388,47</b>

<b>5.5.4.2</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2015</b>
	Iuran Wajib Pegawai	33.667.867.613,00	33.577.351.686,00
	Pajak Penghasilan Ps.21	31.144.322.752,07	33.326.360.412,47
	Pajak Penghasilan Ps.22	548.319.045,00	670.130.939,00
	Pajak Penghasilan Ps.23/Ps.26	306.427.890,00	302.457.282,00
	Pajak Penghasilan Ps.4 Ayat 2	3.362.834.685,00	2.280.816.899,00
	PPn Pusat	19.533.102.345,00	16.140.432.482,00
	Tab. Uang Muka Perum Pegawai	696.805.091,00	698.068.000,00
	ASKES	10.110.522.145,00	10.082.414.688,00
	Beras (Bulog)	0,00	101.000,00
	Sisa dana BOS tahun 2011	132.240.000,00	0,00
	Utang JKK 2015	308.710.934,00	0,00
	Utang JKM 2015	385.883.910,00	0,00
	Silpa (sisa UP/TU yang belum disetor dalam tahun berjalan)	0,00	0,00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>100.197.036.410,07</b>	<b>97.078.133.388,47</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran</b>		<b>6.212.500,00</b>	<b>0,00</b>

Selama TA 2016, arus kas masuk dari aktivitas transitoris/non anggaran bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem sebesar Rp100.203.248.910,07 dan arus kas keluarnya sebesar Rp100.197.036.410,07, sehingga arus kas bersih dari aktivitas transitoris/non anggaran sebesar Rp6.212.500,00.

<b>5.5.5</b>	<b>SALDO AKHIR KAS</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2015</b>
		<b>125.838.294.785,31</b>	<b>142.952.161.067,27</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2016 merupakan saldo awal kas per 1 Januari 2016 ditambah dengan arus kas bersih dari masing-masing aktivitas, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Kenaikan(Penurunan) Kas:		
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	201.446.577.455,47	179.514.070.958,89
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	(194.748.668.326,10)	(162.454.524.995,95)
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	(23.738.865.917,64)	(23.736.572.916,84)
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	6.212.500,00	0,00
<i>Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Kas</i>	<i>(17.034.744.288,27)</i>	<i>(6.677.026.953,90)</i>
Saldo Awal Kas di BUD	142.685.297.190,82	135.391.131.060,46
Saldo Akhir Kas di BUD	125.650.552.902,55	128.714.104.106,56
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	187.741.882,76	70.218.030,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	358.000,00
Saldo Akhir Kas di BLU RSUD Kabupaten Karangasem	0,00	10.790.246.570,81
Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP Puskesmas	0,00	2.134.674.513,96
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	0,00	1.242.559.845,94
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>125.838.294.785,31</b>	<b>142.952.161.067,27</b>

Saldo awal Kas di BUD Tahun 2016 sebesar Rp142.685.297.190,82 merupakan total saldo akhir (SILPA) Tahun 2015 dari kas daerah sebesar Rp128.714.104.106,56, kas di Bendahara FKTP Puskesmas sebesar Rp2.114.073.088,50 serta kas di Bendahara BOS sebesar Rp1.242.559.845,94 dikurangi koreksi kesalahan pencatatan kas BOS pada Tahun 2015 sebesar Rp175.686.420,99 serta kas di BLU RSUD sebesar Rp10.790.246.570,81.

## 5.6 Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan gunggung saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan yaitu Tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya.

### 5.6.1 Saldo Anggaran Lebih Awal **Rp142.860.983.611,81.**

Jumlah tersebut merupakan saldo SiLPA Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Tahun Anggaran 2015, yang terdiri dari:

1. Kas di Kas Daerah	Rp	128.714.104.106,56
2. Kas di Bendahara BLU RSUD Kabupaten Karangasem	Rp	10.790.246.570,81
3. Kas di Bendahara FKTP Puskesmas	Rp	2.134.674.513,96
4. Kas di Bendahara BOS	Rp	1.242.559.845,94

---

**Jumlah** **Rp 142.860.983.611,81**

### 5.6.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan **Tahun Berjalan** **Rp142.685.297.190,82**

Jumlah tersebut merupakan SiLPA Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2015 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2016 dan digunakan seluruhnya dalam operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2016

sebesar Rp142.685.297.190,82 setelah dikurangi kesalahan pencatatan tahun sebelumnya pada kas bendahara bos sebesar Rp175.686.420,99.

**5.6.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp125.644.340.402,55**

Jumlah tersebut merupakan SiLPA dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam periode TA 2016 yang terdiri dari:

1. Kas di Kas Daerah	Rp	118.967.157.856,36
2. Kas di Bendahara BLU RSUD Kabupaten Karangasem	Rp	3.131.930.393,54
3. Kas di Bendahara FKTP Puskesmas	Rp	1.536.936.233,38
4. Kas di Bendahara BOS	Rp	2.008.315.919,27
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>125.644.340.402,55</b>

**5.6.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp125.644.340.402,55**

Jumlah tersebut merupakan Saldo Anggaran Lebih TA 2016 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	142.860.983.611,81
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	(142.685.297.190,82)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	125.644.340.402,55
	<b>Rp</b>	<b>125.820.026.823,54</b>
Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	(175.686.420,99)
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>125.644.340.402,55</b>

Nilai Saldo Anggaran Lebih Akhir sama dengan nilai SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran.

**5.7 Informasi Lain**

Atas tagihan/kerugian keuangan daerah dari Dana Pengabdian yang telah diterima Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Karangasem Periode 1999-2004 sebesar Rp2.906.000.000,00 (hasil audit BPK Tahun 2005 dan 2006) sampai saat penyusunan laporan keuangan ini belum ada tindak lanjutnya. Sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 592/K/Pidsus/2007 tanggal 28 Agustus 2008 perkara kasasi pidana khusus dengan terdakwa I Nyoman Matal menyatakan bahwa:

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum; dan
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Berdasarkan keputusan tersebut akan dijadikan dasar untuk menindak lanjuti hasil temuan.

## **5.8 Pengungkapan Informasi untuk Pos- Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja**

Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak menerapkan basis akrual atas pendapatan dan belanja, seluruh nilai-nilai dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disajikan dengan basis kas. Sehingga tidak perlu dilakukan rekonsiliasi dengan basis kas. Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul karena penerapan basis akrual. Pos-pos aset seperti: Sewa Dibayar Dimuka, Biaya Dibayar Dimuka, Pendapatan/Laba yang Masih Harus Diterima, dan pos kewajiban seperti: Utang Bunga, Laba Diterima Dimuka timbul murni karena penerapan basis akrual pada pos aset dan kewajiban tidak mempengaruhi pos-pos pendapatan dan belanja.



## **BAB VI**

### **Penjelasan atas Informasi Non Keuangan**

#### **6.1 Letak Geografis**

Karangasem adalah salah satu dari sembilan kabupaten di Provinsi Bali, yang terletak diantara 08°00'00"- 08°41'37,8"LS dan 115°35'9,8"- 115°54'8,9"BT di ujung Timur Pulau Bali. Berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng disebelah Barat, Laut Bali di sebelah Utara, Selat Lombok di sebelah Timur, serta Samudra Indonesia di sebelah Selatan. Luas Kabupaten Karangasem adalah 839,54 km<sup>2</sup> atau 14,90% dari luas Provinsi Bali yang mempunyai luas 5.632,86 km<sup>2</sup>.

#### **6.2 Dasar Hukum Pembentukan**

Sebagai sebuah kabupaten, Karangasem dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pusat pemerintahan Kabupaten Karangasem terletak di kota Amlapura sekaligus sebagai ibu kota kabupaten. Kabupaten Karangasem merupakan daerah otonom yang menjadi bagian dari Provinsi Bali.

#### **6.3 Pemerintahan**

Pemerintah Kabupaten Karangasem merupakan bagian integral dari Pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, sebagai Daerah Otonom. Pemerintah Kabupaten Karangasem mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Karangasem dibagi menjadi 8 (delapan) Kecamatan, 3 (tiga) Kelurahan, 75 Desa Dinas, 529 Banjar Dinas, 52 Lingkungan, 190 Desa Adat/Pakraman dan 605 Banjar Adat (berdasarkan data tahun 2011). Domisili Kantor Pemerintah Kabupaten Karangasem berada di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 31, Amlapura.

Kepala Daerah (Bupati) selaku pemimpin Kabupaten Karangasem pada saat penyusunan laporan ini adalah I Gusti Ayu Mas Sumatri, Sos, MAP dan dibantu oleh Wakil Bupati, I Wayan Artha Dipa, SH,MA. Tahun 2016 merupakan awal masa jabatan kepala daerah yang dipilih untuk masa jabatan 2016 –2021.

Dalam menunjang pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dibentuk meliputi:

- 1 Sekretariat DPRD;
- 2 Sekretariat Daerah;
- 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 4 Inspektorat Daerah;
- 5 Badan Pemberdayaan Masyarakat;

- 6 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- 7 Badan Lingkungan Hidup;
- 8 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- 9 Badan Kepegawaian Daerah;
- 10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 11 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
- 12 Dinas Kesehatan;
- 13 Dinas Pekerjaan Umum;
- 14 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 15 Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- 16 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
- 17 Dinas Pendapatan Daerah;
- 18 Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- 19 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 20 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 21 Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran;
- 22 Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 23 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 24 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 25 Dinas Sosial;
- 26 Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 27 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- 28 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
- 29 Kantor Ketahanan Pangan;
- 30 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- 31 Rumah Sakit Umum Karangasem;
- 32 Kecamatan Bebandem;
- 33 Kecamatan Abang;
- 34 Kecamatan Karangasem;
- 35 Kecamatan Kubu;
- 36 Kecamatan Manggis;
- 37 Kecamatan Rendang;
- 38 Kecamatan Selat;
- 39 Kecamatan Sidemen;
- 40 Kelurahan Karangasem;
- 41 Kelurahan Padangkerta; dan
- 42 Kelurahan Subagan

Sumber dan menjalankan fungsi aktivitas pemerintahan berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan serta pendapatan bagi hasil dari Provinsi. Dana Perimbangan antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana DPDF, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Penggunaan dana adalah untuk menunjang belanja operasi, belanja modal, bagi hasil kepada daerah bawahan dan pembiayaan.

#### **6.4 Lainnya**

Dalam Tahun 2016 terjadi pergantian manajemen baru dalam pemerintahan, beberapa pejabat eksekutif mengalami pergantian karena mutasi ataupun pensiun, namun tidak terdapat perubahan kebijakan yang material dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian tidak ada

dijumpai adanya kesalahan yang sangat material dari kebijakan manajemen yang perlu dan telah dikoreksi oleh manajemen.

Tidak terdapat komitmen dan kontijensi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan pihak lain. Sehingga tidak ada pengaruh dalam penyajian laporan keuangan.

**Amlapura, 22 Agustus 2017**

**BUPATI KARANGASEM**

**ttd**

**I GUSTI AYU MAS SUMATRI**





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
LAPORAN ARUS KAS  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam Rupiah)

Uraian	Ref CaLK	Tahun 2016	Tahun 2015
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>5.5.1</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.1.1</b>		
Pendapatan Pajak Daerah		117.782.188.084,34	139.626.191.925,60
Pendapatan Retribusi Daerah		15.984.975.219,86	14.255.155.130,03
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		13.592.314.005,36	13.535.055.710,61
Lain-lain PAD yang Sah		85.095.224.860,02	9.512.416.792,59
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak		21.458.384.197,00	16.048.886.800,00
Pendapatan Dana Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		989.021.895,00	1.258.613.033,00
Pendapatan Dana Alokasi Umum		732.963.859.000,00	633.241.287.000,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus		182.216.756.500,00	55.877.344.000,00
Pendapatan Dana Penyesuaian		49.301.984.000,00	178.178.534.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		102.832.588.478,39	105.387.045.055,81
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-
Pendapatan Hibah		73.937.389.816,20	11.932.554.440,00
Pendapatan Lainnya		65.680.351.739,53	55.265.408.202,59
Pendapatan Luar Biasa		-	-
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>1.461.835.037.795,80</b>	<b>1.234.118.492.090,23</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.1.2</b>		
Belanja Pegawai		778.530.682.421,10	696.387.432.961,86
Belanja Barang dan Jasa		300.494.138.056,40	164.271.654.044,00
Belanja Bunga		2.580.813.297,58	4.458.177.338,66
Subsidi		-	-
Hibah		5.882.089.087,00	47.230.976.805,00
Bantuan Sosial		901.010.000,00	1.650.312.900,00
Belanja Bantuan Keuangan		158.105.735.770,19	123.735.350.236,75
Belanja Tak Terduga		163.681.200,00	584.263.646,00
Bagi Hasil Pajak		12.151.726.735,06	16.285.253.201,07
Bagi Hasil Retribusi		1.578.583.783,00	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
Transfer		-	-
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>1.260.388.460.340,33</b>	<b>1.054.604.421.131,34</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1.3</b>	<b>201.446.577.455,47</b>	<b>179.514.070.958,89</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>5.5.2</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.2.1</b>		
Lain-Lain PAD yang Sah - Penjualan Bahan Bekas Bangunan		54.977.300,00	67.274.150,00
Lain-Lain PAD yang Sah - Penjualan Aset Tetap Lainnya Hewan Ternak		131.682.760,00	-
Lain-Lain PAD yang Sah - Penjualan Sampah Plastik		2.651.000,00	-
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>189.311.060,00</b>	<b>67.274.150,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.2.2</b>		
Belanja Tanah		-	-
Belanja Peralatan dan Mesin		36.851.218.597,10	39.891.870.497,46
Belanja Gedung dan Bangunan		55.713.764.319,00	50.494.807.502,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		83.450.588.309,00	66.017.518.430,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		14.422.408.161,00	1.138.592.700,00
Belanja Aset Lainnya		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		4.500.000.000,00	4.978.010.018,49
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>194.937.979.386,10</b>	<b>162.521.799.145,95</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.5.2.3</b>	<b>(194.748.668.326,10)</b>	<b>(162.454.524.995,95)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>5.5.3</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.3.1</b>		
Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		9.507.000,00	11.800.000,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>9.507.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.3.2</b>		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah		23.748.372.917,64	23.748.372.916,84
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>23.748.372.917,64</b>	<b>23.748.372.916,84</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>5.5.3.3</b>	<b>(23.738.865.917,64)</b>	<b>(23.736.572.916,84)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>5.5.4</b>		

Uraian	Ref CaLK	Tahun 2016	Tahun 2015
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		100.203.248.910,07	97.078.133.388,47
Saldo sisa UP TA 2015		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		100.203.248.910,07	97.078.133.388,47
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.4.1</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		100.197.036.410,07	97.078.133.388,47
Saldo sisa UP TA 2016		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		100.197.036.410,07	97.078.133.388,47
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>5.5.4.3</b>	<b>6.212.500,00</b>	<b>-</b>
Kenaikan / (Penurunan Kas selama Periode ini)		(17.034.744.288,27)	(6.677.026.953,90)
Saldo Awal Kas di BUD		142.685.297.190,82	135.391.131.060,46
Saldo Akhir Kas di BUD		125.650.552.902,55	128.714.104.106,56
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		187.741.882,76	70.218.030,00
Saldo Akhir Kas di B. Pengeluaran (PFK)		-	358.000,00
Saldo Akhir Kas di BLUD		-	10.790.246.570,81
Saldo Akhir Kas di FKTP		-	2.134.674.513,96
Saldo Akhir Kas di BOS		-	1.242.559.845,94
Saldo Akhir Kas	<b>5.5.5</b>	<b>125.838.294.785,31</b>	<b>142.952.161.067,27</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Amlempura, 22 Agustus 2017  
 BUPATI KARANGASEM



I GUSTI AYU MAS SUMATRI



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam Rupiah)

Uraian	Ref. CaLK	2016	2015	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>5.4.1</b>				
<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>1.475.538.416.472,56</b>	<b>1.381.130.585.918,35</b>	<b>94.407.830.554,21</b>	<b>93,60</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.4.1.1.1</b>	<b>250.618.032.877,33</b>	<b>252.715.300.681,09</b>	<b>(2.097.267.803,76)</b>	<b>100,84</b>
Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1.1	129.161.868.598,32	146.376.070.138,12	(17.214.201.539,80)	113,33
Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.1.2	16.629.845.716,86	13.408.932.499,03	3.220.913.217,83	80,63
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.1.3	13.592.314.005,36	13.535.055.710,61	57.258.294,75	99,58
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.4.1.1.1.4	91.234.004.556,79	79.395.242.333,33	11.838.762.223,46	87,02
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.4.1.2</b>	<b>1.083.720.361.256,20</b>	<b>991.483.235.474,67</b>	<b>92.237.125.781,53</b>	<b>91,49</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>5.4.1.2.1</b>	<b>937.628.021.592,00</b>	<b>706.426.130.833,00</b>	<b>231.201.890.759,00</b>	<b>75,34</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.1.2.1.1	21.458.384.197,00	16.048.888.800,00	5.409.497.397,00	74,79
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.4.1.2.1.2	989.021.895,00	1.258.613.033,00	(269.591.138,00)	127,26
Dana Alokasi Umum	5.4.1.2.1.3	732.963.859.000,00	633.241.287.000,00	99.722.572.000,00	86,39
Dana Alokasi Khusus	5.4.1.2.1.4	182.216.756.500,00	55.877.344.000,00	126.339.412.500,00	30,67
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>5.4.1.2.2</b>	<b>49.301.984.000,00</b>	<b>178.178.534.000,00</b>	<b>(128.876.550.000,00)</b>	<b>361,40</b>
Dana Penyesuaian	5.4.1.2.2.1	49.301.984.000,00	178.178.534.000,00	(128.876.550.000,00)	361,40
<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>5.4.1.2.3</b>	<b>96.790.355.664,20</b>	<b>106.878.570.641,67</b>	<b>(10.088.214.977,47)</b>	<b>110,42</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	5.4.1.2.3.1	96.790.355.664,20	106.878.570.641,67	(10.088.214.977,47)	110,42
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.4.1.2.3.2	-	-	-	-
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>5.4.1.3</b>	<b>141.200.022.339,03</b>	<b>136.932.049.762,59</b>	<b>4.267.972.576,44</b>	<b>96,98</b>
Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	75.519.670.599,40	81.599.367.410,00	(6.079.696.810,60)	108,05
Pendapatan Lainnya	5.4.1.3.2	65.680.351.739,63	55.332.682.352,59	10.347.669.387,04	84,25
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.475.538.416.472,56</b>	<b>1.381.130.585.918,35</b>	<b>94.407.830.554,21</b>	<b>93,60</b>
<b>BEBAN</b>	<b>5.4.1.2</b>	<b>1.383.793.261.441,20</b>	<b>1.309.879.317.060,06</b>	<b>73.913.944.381,14</b>	<b>94,68</b>
Beban Pegawai	5.4.1.2.1	780.214.447.215,41	733.053.130.434,41	47.161.316.781,00	93,96
Beban Persediaan	5.4.1.2.2	86.521.387.685,60	56.502.322.196,01	30.019.065.489,60	85,30
Beban Jasa	5.4.1.2.3	133.689.968.669,71	135.604.401.523,00	(1.914.432.853,29)	101,43
Beban Pemeliharaan	5.4.1.2.4	25.951.746.028,00	29.982.754.090,00	(4.031.008.062,00)	115,53
Beban Perjalanan Dinas	5.4.1.2.5	48.043.259.468,00	29.764.526.930,00	18.278.732.538,00	61,95
Beban Bunga	5.4.1.2.6	2.580.813.297,58	4.458.177.336,68	(1.877.364.039,08)	172,74
Beban Subsidi	5.4.1.2.7	-	-	-	-
Beban Hibah	5.4.1.2.8	8.026.367.097,00	48.794.006.800,00	(38.767.639.703,00)	583,00
Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.9	5.078.965.607,00	1.850.312.900,00	3.228.652.707,00	32,49
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.1.2.10	112.128.869.125,96	108.327.972.475,95	3.800.896.650,00	96,61
Beban Penyisihan Piutang	5.4.1.2.11	2.367.274.222,69	16.167.983.055,91	(13.800.708.833,22)	682,98
Beban Penyisihan Investasi Non Permanen	5.4.1.2.12	-	11.783.443.625,08	(11.783.443.625,08)	-
Beban Transfer	5.4.1.2.13	171.836.046.288,25	130.721.852.573,04	41.114.193.695,21	76,07
Beban Lain-Lain	5.4.1.2.14	7.354.116.756,00	5.068.433.120,00	2.285.683.636,00	68,92
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>1.383.793.261.441,20</b>	<b>1.309.879.317.060,06</b>	<b>73.913.944.381,14</b>	<b>94,66</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>91.745.155.031,36</b>	<b>71.251.268.858,29</b>	<b>20.493.886.173,07</b>	<b>77,66</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>5.4.2</b>	<b>(345.717.818,00)</b>	<b>(389.397.520,00)</b>	<b>(735.115.338,00)</b>	<b>112,63</b>
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	5.4.2.1	-	-	-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.2.2	-	-	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	5.4.2.3	-	-	-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.2.4	-	-	-	-
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.2.5	(345.717.818,00)	(389.397.520,00)	(735.115.338,00)	112,63
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>(345.717.818,00)</b>	<b>(389.397.520,00)</b>	<b>(735.115.338,00)</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>91.399.437.213,36</b>	<b>70.861.871.338,29</b>	<b>19.537.565.875,07</b>	<b>77,53</b>

Uraian	Ref. CaLK	2016	2015	Kenaikan/ (Penurunan)	%
POS LUAR BIASA	5.4.3	(163.681.200,00)	(608.582.646,00)	444.901.446,00	-
Pendapatan Luar Biasa	5.4.3.1	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	5.4.3.2	163.681.200,00	608.582.646,00	(444.901.446,00)	-
JUMLAH POS LUAR BIASA		(163.681.200,00)	(608.582.646,00)	444.901.446,00	371,81
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	5.4.4	91.235.756.013,38	70.253.288.692,29	20.203.672.281,07	77,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan







**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam Rupiah)

Uraian	Ref CaLK	Tahun	
		2016	2015
<b>Ekuitas Awal</b>	<b>5.2.1</b>	<b>1.227.911.800.367,30</b>	<b>1.238.704.761.105,66</b>
<b>Surplus/(Defisit) LO</b>	<b>5.2.2</b>	<b>91.235.756.013,36</b>	<b>70.253.288.692,29</b>
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:</b>	<b>5.2.3</b>	<b>79.598.420.754,63</b>	<b>(81.046.249.430,65)</b>
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan:</b>	<b>5.2.3.1</b>	<b>46.947.170.336,78</b>	<b>(70.650.998.202,71)</b>
Koreksi Nilai Persediaan		-	(24.537.222,31)
Koreksi Kesalahan Pencatatan (Kurang Catat) Piutang		-	-
Koreksi Penyisihan Piutang		-	(1.594.792.936,66)
Koreksi Penyisihan Investasi Non permanen		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Penyesuaian Akumulasi Aset Tetap		21.411.308.571,48	(61.136.650.683,96)
Penyesuaian Akumulasi Aset Tetap pada Aset Lainnya		-	(7.895.017.359,79)
Koreksi ekuitas lainnya		25.535.861.765,30	-
<b>Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar:</b>	<b>5.2.3.2</b>	<b>32.651.250.417,85</b>	<b>(10.395.251.227,93)</b>
Koreksi Nilai Persediaan		-	72.141.100,00
Koreksi Kesalahan Pencatatan Piutang		(40,00)	(9.209.319.276,97)
Koreksi Penyisihan Piutang		54.494,10	11.964.571.187,47
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi ekuitas lainnya		32.651.195.963,75	(13.222.644.238,44)
			-
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>5.2.4</b>	<b>1.398.745.977.135,29</b>	<b>1.227.911.800.367,30</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Amlapura, 22 Agustus 2017  
**BUPATI KARANGASEM**



**GUSTI AYU MAS SUMATRI**



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
Per 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam Rupiah)

Uraian	Ref CaLK	Tahun	
		2016	2015
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.6.1	142.860.983.611,81	155.844.273.975,44
Penggunaan SAL Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.6.2	142.685.297.190,82	155.844.273.975,44
<b>Subtotal</b>		<b>175.686.420,99</b>	-
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.6.3	125.644.340.402,55	142.860.983.611,81
<b>Subtotal</b>		<b>125.820.026.823,54</b>	<b>142.860.983.611,81</b>
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-Lain		(175.686.420,99)	-
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>5.6.4</b>	<b>125.644.340.402,55</b>	<b>142.860.983.611,81</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Amiapura, 22 Agustus 2017  
BUPATI KARANGASEM  
  
IGUSTI AYU MAS SUMATRI



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	Ref. CaLK	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2015	Selisih (+)/(-)	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5.3.1</b>	<b>1.455.013.902.263,25</b>	<b>1.462.024.348.855,80</b>	<b>100,48</b>	<b>1.367.577.569.045,00</b>	<b>7.010.446.592,55</b>	<b>100,48</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.3.1.1</b>	<b>229.346.684.510,26</b>	<b>232.644.013.229,58</b>	<b>101,44</b>	<b>243.125.917.433,60</b>	<b>3.298.328.719,32</b>	<b>101,44</b>
Pendapatan Pajak Daerah	5.3.1.1.1	118.838.365.175,00	117.732.188.064,34	99,11	139.626.191.925,60	(1.056.177.090,66)	99,11
Pendapatan Retribusi Daerah	5.3.1.1.2	13.960.005.000,00	15.994.975.219,85	114,51	14.255.155.130,03	2.024.970.219,86	114,51
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.3	13.591.711.197,36	13.592.314.005,35	100,00	13.535.055.710,61	602.808,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.3.1.1.4	82.956.603.137,80	65.284.535.920,02	102,81	75.709.514.667,36	2.326.932.782,12	102,81
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.3.1.2</b>	<b>1.089.720.003.713,36</b>	<b>1.089.762.594.070,39</b>	<b>100,00</b>	<b>989.991.709.888,81</b>	<b>42.590.357,03</b>	<b>100,00</b>
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.3.1.2.1	930.264.999.034,07	937.628.021.592,00	100,79	706.426.130.833,00	7.363.022.557,83	100,79
Dana Bagi Hasil Pajak	5.3.1.2.1.1	21.596.966.000,00	21.458.384.197,00	99,36	16.048.886.800,00	(138.581.803,00)	99,36
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	5.3.1.2.1.2	1.618.176.622,07	989.021.895,00	61,12	1.258.613.033,00	(629.154.727,07)	61,12
Dana Alokasi Umum	5.3.1.2.1.3	679.878.442.612,00	732.963.659.000,00	107,81	633.241.287.000,00	53.085.416.388,00	107,81
Dana Alokasi Khusus	5.3.1.2.1.4	227.171.413.800,00	192.216.756.500,00	80,21	55.877.344.000,00	(44.954.657.300,00)	80,21
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.3.1.2.2	49.301.984.000,00	49.301.984.000,00	100,00	178.178.534.000,00	-	100,00
Dana Penyesuaian	5.3.1.2.2.1	49.301.984.000,00	49.301.984.000,00	100,00	178.178.534.000,00	-	100,00
Transfer Pemerintah Provinsi	5.3.1.2.3	110.153.020.679,29	102.832.588.478,39	93,35	105.387.045.055,81	(7.320.432.200,90)	93,35
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	5.3.1.2.3.1	110.153.020.679,29	102.832.588.478,39	93,35	105.387.045.055,81	(7.320.432.200,90)	93,35
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.3.1.2.3.2	-	-	-	-	-	-
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>5.3.1.3</b>	<b>135.948.214.039,63</b>	<b>139.617.741.555,83</b>	<b>102,70</b>	<b>134.459.941.722,59</b>	<b>3.669.527.516,20</b>	<b>102,70</b>
Pendapatan Hibah	5.3.1.3.1	89.568.400.000,00	73.937.389.816,20	106,28	79.127.259.370,00	4.368.689.818,20	106,28
Pendapatan Lainnya	5.3.1.3.2	88.379.814.039,63	65.680.351.739,63	98,55	55.332.682.352,59	(696.462.300,00)	98,55
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>1.455.013.902.263,25</b>	<b>1.462.024.348.855,80</b>	<b>100,48</b>	<b>1.367.577.569.045,00</b>	<b>7.010.446.592,55</b>	<b>100,48</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.3.2</b>	<b>1.569.374.885.875,06</b>	<b>1.450.826.439.726,43</b>	<b>92,45</b>	<b>1.351.846.276.475,30</b>	<b>(118.548.446.148,63)</b>	<b>92,45</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.3.2.1</b>	<b>1.296.864.157.857,00</b>	<b>1.246.494.468.642,27</b>	<b>96,13</b>	<b>1.156.551.120.791,77</b>	<b>(50.169.689.014,73)</b>	<b>96,13</b>
Belanja Pegawai	5.3.2.1.1	797.755.278.233,71	778.530.682.421,10	97,59	730.687.208.129,86	(19.224.595.812,61)	97,59
Belanja Barang	5.3.2.1.2	330.832.219.278,09	300.494.138.056,40	90,83	248.689.095.383,50	(30.338.081.221,69)	90,83
Belanja Bunga	5.3.2.1.3	3.000.000.000,00	2.580.813.297,58	86,03	4.458.177.336,66	(419.189.702,42)	86,03
Belanja Subsidi	5.3.2.1.4	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	5.3.2.1.5	5.612.100.000,00	5.892.089.097,00	99,49	47.230.976.805,00	(30.010.903,00)	99,49
Belanja Bantuan Sosial	5.3.2.1.6	955.000.000,00	901.010.000,00	94,35	1.650.312.900,00	(53.990.000,00)	94,35
Belanja Bantuan Keuangan	5.3.2.1.7	158.209.590.145,20	158.105.735.770,19	99,93	123.735.350.236,75	(103.824.375,01)	99,93
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.3.2.2</b>	<b>257.980.417.720,00</b>	<b>190.437.979.386,10</b>	<b>73,82</b>	<b>178.424.638.836,46</b>	<b>(67.542.438.333,80)</b>	<b>73,82</b>
Belanja Modal - Tanah	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	-	44.274.003.836,00	38.851.218.597,10	83,23	59.002.978.304,48	(7.422.785.241,90)	83,23
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	-	67.682.270.238,00	55.713.764.319,00	82,32	52.152.026.402,00	(11.958.505.915,00)	82,32
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	130.251.810.370,00	83.450.589.309,00	64,07	66.130.041.430,00	(46.801.222.061,00)	64,07
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	-	15.772.333.273,00	14.422.408.161,00	91,44	1.139.582.700,00	(1.349.925.112,00)	91,44
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>5.3.2.3</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>163.681.200,00</b>	<b>16,37</b>	<b>584.263.548,00</b>	<b>(836.318.800,00)</b>	<b>16,37</b>
Belanja Tak Terduga	-	1.000.000.000,00	163.681.200,00	16,37	584.263.548,00	(836.318.800,00)	16,37
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>5.3.2.4</b>	<b>13.730.310.498,06</b>	<b>13.730.310.498,06</b>	<b>100,00</b>	<b>16.286.253.201,07</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
Bagi Hasil Pendapatan	5.3.2.4.1	13.730.310.498,06	13.730.310.498,06	100,00	16.286.253.201,07	-	100,00
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>		<b>1.569.374.885.875,06</b>	<b>1.450.826.439.726,43</b>	<b>92,45</b>	<b>1.351.846.276.475,30</b>	<b>(118.548.446.148,63)</b>	<b>92,45</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>(114.360.983.611,81)</b>	<b>11.197.909.129,37</b>	<b>(9,79)</b>	<b>15.731.292.569,70</b>	<b>125.558.892.741,18</b>	<b>(9,79)</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>5.3.3</b>						
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.3.3.1</b>	<b>142.860.983.611,81</b>	<b>142.694.804.190,82</b>	<b>99,88</b>	<b>155.856.073.975,44</b>	<b>(166.179.420,99)</b>	<b>99,88</b>
Penggunaan SILPA	-	142.860.983.611,81	142.685.297.190,82	99,88	155.844.273.975,44	(175.666.420,99)	99,88
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	9.507.000,00	-	11.800.000,00	9.507.000,00	-

Uraian	Ref. CaLK	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2015	Selisih (+)/(-)	%
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.3.3.2</b>	<b>28.500.000.000,00</b>	<b>28.248.372.917,54</b>	<b>99,12</b>	<b>28.726.382.933,33</b>	<b>(251.627.062,36)</b>	<b>99,12</b>
Penyerahan Modal Pemerintah Daerah		4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	4.978.010.016,49	-	100,00
Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga		24.000.000.000,00	23.748.372.917,54	98,95	23.748.372.916,84	(251.627.062,36)	98,95
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN BERSIH</b>		<b>114.360.983.611,81</b>	<b>114.448.431.273,18</b>	<b>100,07</b>	<b>127.129.691.042,11</b>	<b>85.447.661,37</b>	<b>100,07</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0</b>	<b>(0,00)</b>	<b>125.644.340.462,55</b>	<b>-</b>	<b>142.860.983.611,81</b>	<b>125.644.340.402,55</b>	<b>-</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
NERACA  
Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015  
(Audited)

(dalam Rupiah)

Uraian	Ref. CaLK	Tahun 2016	Tahun 2015
<b>ASET</b>	<b>5.1.1</b>	<b>1.472.026.534.807,33</b>	<b>1.282.291.042.562,05</b>
<b>ASET LANCAR</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>204.507.613.188,10</b>	<b>210.648.675.780,06</b>
Kas di Kas Daerah	5.1.1.1.1	118.968.370.356,36	128.714.104.106,56
Kas di Bendahara Penerimaan	5.1.1.1.2	187.741.862,76	70.218.030,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.1.1.1.3	-	358.000,00
Kas di Bendahara BLUD	5.1.1.1.4	3.131.930.393,54	10.790.246.570,81
Kas di Bendahara FKTP Puskesmas	5.1.1.1.5	1.541.936.233,38	2.134.674.513,96
Kas di Bendahara BOS	5.1.1.1.6	2.008.315.919,27	1.242.559.845,94
Piutang	5.1.1.1.7	67.693.934.052,88	58.194.806.970,40
Piutang Pajak	5.1.1.1.7.1	51.445.499.827,65	40.065.866.246,67
Penyisihan Piutang Pajak	5.1.1.1.7.2	(16.924.984.803,22)	(14.732.965.907,90)
Piutang Retribusi	5.1.1.1.7.3	809.957.726,00	300.485.829,00
Penyisihan Piutang Retribusi	5.1.1.1.7.4	(8.109.477,26)	(3.014.758,29)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.1.1.1.7.5	103.612.800,00	107.569.200,00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.1.1.1.7.6	(1.036.128,00)	(1.075.692,00)
Piutang lainnya	5.1.1.1.7.7	32.854.852.419,15	32.934.077.014,20
Penyisihan Piutang Lainnya	5.1.1.1.7.8	(585.858.311,44)	(476.134.961,28)
Beban Dibayar Dimuka	5.1.1.1.8	45.270.833,33	65.820.833,33
Persediaan	5.1.1.1.9	10.930.113.516,57	9.435.886.909,05
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>204.507.613.188,10</b>	<b>210.648.675.780,06</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>100.690.653.166,02</b>	<b>67.219.165.516,14</b>
Investasi Non Permanen	5.1.1.2.1	-	-
Dana Bergulir	5.1.1.2.1.1	341.700.106,08	351.207.106,08
Penyisihan Dana Bergulir	5.1.1.2.1.2	(341.700.106,08)	(351.207.106,08)
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	5.1.1.2.1.3	11.432.236.519,00	11.432.236.519,00
Penyisihan Investasi Dalam Poyek Pembangunan	5.1.1.2.1.4	(11.432.236.519,00)	(11.432.236.519,00)
Investasi Permanen	5.1.1.2.2	100.690.653.166,02	67.219.165.516,14
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.1.2.2.1	100.690.653.166,02	67.219.165.516,14
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>100.690.653.166,02</b>	<b>67.219.165.516,14</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>1.157.723.672.956,24</b>	<b>987.539.186.121,21</b>
Tanah	5.1.1.3.1	181.910.839.355,50	119.424.783.533,50
Peralatan dan Mesin	5.1.1.3.2	339.793.223.647,87	314.622.374.835,87
Gedung dan Bangunan	5.1.1.3.3	653.990.016.583,23	601.039.095.231,18
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.1.3.4	1.025.249.503.645,70	913.997.985.912,60
Aset Tetap Lainnya	5.1.1.3.5	35.170.716.869,98	36.398.677.265,52
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.1.1.3.6	3.716.599.980,00	12.644.696.215,00
Akumulasi Penyusutan	5.1.1.3.7	(1.082.107.227.126,04)	(1.010.588.426.892,46)
<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>		<b>1.157.723.672.956,24</b>	<b>987.539.186.121,21</b>
<b>DANA CADANGAN</b>	<b>5.1.1.4</b>	-	-
Dana Cadangan	5.1.1.4.1	-	-
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>		-	-
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>5.1.1.5</b>	<b>9.104.595.496,97</b>	<b>16.884.015.144,64</b>
Aset Tidak Berwujud	5.1.1.5.1	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	5.1.1.5.2	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	5.1.1.5.3	-	-
Aset Lain-Lain	5.1.1.5.4	9.104.595.496,97	16.884.015.144,64
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>9.104.595.496,97</b>	<b>16.884.015.144,64</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1.472.026.534.807,33</b>	<b>1.282.291.042.562,05</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>5.1.2</b>	<b>73.280.557.672,04</b>	<b>54.379.242.194,75</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>5.1.2.1</b>	<b>72.953.375.377,75</b>	<b>34.880.989.381,82</b>
Utang Perhitungan Pihak ketiga	5.1.2.1.1	6.212.500,00	395.450,00
Utang Bunga	5.1.2.1.2	647.662.353,01	1.959.673.840,46
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.1.2.1.3	19.171.070.518,64	23.748.372.917,64
Pendapatan Diterima Dimuka	5.1.2.1.4	38.047.708,33	66.950.141,67
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.1.2.1.5	53.090.382.297,77	9.105.597.032,03
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>72.953.375.377,75</b>	<b>34.880.989.381,82</b>

Uraian	Ref. CaLK	Tahun 2016	Tahun 2015
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>5.1.2.2</b>	<b>327.182.294,29</b>	<b>19.498.252.812,93</b>
Utang Dalam Negeri	5.1.2.2.1	327.182.294,29	19.498.252.812,93
<b>Jumlah Utang Jangka Panjang</b>		<b>327.182.294,29</b>	<b>19.498.252.812,93</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>73.280.557.672,04</b>	<b>54.379.242.194,75</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>5.1.3</b>	<b>1.398.745.977.135,29</b>	<b>1.227.911.800.367,30</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>1.472.026.534.807,33</b>	<b>1.282.291.042.562,05</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

